

TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id

www.sinartani.co.id

Edisi 11 - 17 Juni 2025

No. 4090
Tahun LV



8 Bersiap Hadapi Musim Kemarau

10 Sriani, Sosok di Balik Layar Populernya Pepaya California

14 Jangan Salah Mengolah dan Menyimpan Daging Kurban

ERA BARU TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI



www.tabloidsinartani.com

tabloidsinartani.com

@SinarTaniST

tabloidsinartani

SINTA TV

FDK An Agricultural Company

BoomFlower[®] BOOMBASTIS



Akselerator Tanaman

- ✓ Mempercepat penyerapan unsur hara,
- ✓ Mempercepat adaptasi dan pemulihan tanaman,
- ✓ Mempercepat pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman.



EDITORIAL

Babak Baru Pupuk Bersubsidi



Penyalaran pupuk subsidi di Indonesia resmi memasuki babak baru. Mulai pertengahan Mei 2025, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 sebagai regulasi teknis pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Jika kita menengok ke belakang, maka persoalan distribusi pupuk memang kerap mendapat keluhan dari petani. Bahkan beberapa kali pemerintah mengubah kebijakan. Dari mulai distribusi pupuk secara tertutup, kemudian mekanisme melalui Kartu Tani hingga melalui e-RDKK dan hanya dengan KTP. Kemudian membuka kesempatan realokasi stok pupuk dari satu daerah ke daerah lain.

Namun berbagai mekanisme yang pemerintah buat belum mampu memberikan jalan keluar, masih banyak petani yang terkendala mendapatkan pupuk bersubsidi. Di tingkat petani sendiri, persoalan lokasi tempat tinggal jauh dari kios atau pengecer pupuk bersubsidi juga menjadi hambatan tersendiri. Akhirnya, prinsip 6 T yakni (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, mutu) sulit terpenuhi.

Bahkan pada tahun 2022, DPR RI sempat membentuk Panja Pupuk untuk mengevaluasi regulasi pupuk. Beberapa rekomendasi terkait, komoditas yang berhak menerima pupuk bersubsidi, mengalihkan alokasi pupuk bersubsidi untuk perikanan budidaya ke komoditas prioritas pertanian.

Panja juga merekomendasikan untuk mengurangi jenis pupuk bersubsidi hanya pada NPK dan Urea. Selain itu, juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada BUMDES, Koperasi dan atau Gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk bersubsidi.

Kini di tengah upaya pemerintah kini menggenjot produksi pangan (padi dan jagung), Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 6 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk bersubsidi. Sebagai sarana produksi vital untuk meningkatkan produktivitas tanaman, pemerintah mencoba mengurai benang kusut distribusi pupuk bersubsidi.

Terdapat paradigma baru dalam sasaran tata kelola pupuk bersubsidi. Misalnya, memangkas distribusi pupuk dengan memangkas regulasi. Selama ini ternyata regulasi yang mengatur pupuk bersubsidi dari produksi sampai distribusi sebanyak 145 peraturan. Kementerian/Lembaga yang mengurus pupuk bersubsidi juga cukup banyak.

Begitu juga dalam distribusi pupuk. Jika sebelumnya harus melalui banyak tahap dari lini 1 sampai 4, maka kini dari Pupuk Indonesia hanya melalui distributor kemudian langsung ke pengecer/kios, bisa juga ke kelompok tani. Termasuk koperasi desa merah putih yang pemerintah sedang dorong pendiriannya. Sedangkan titik serah pupuk bersubsidi berada di kelompok tani dan kelompok pembudidaya ikan.

Untuk penerima pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas sasaran. Kini ada 10 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Komoditas tanaman pangan yakni padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Komoditas hortikultura yakni, cabai, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan subsektor perkebunan untuk petani tebu rakyat, kakao dan kopi. Satu lagi adalah pembudidaya ikan.

Langkah yang pemerintah ambil tersebut menjadi bagian dari reformasi untuk memastikan pupuk benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas petani. Namun di lapangan tak semudah membalikkan telapak tangan.

SAUNG TANI



Tata kelola pupuk subsidi kini masuki babak baru

- Semoga lebih baik

Pemerintah wajibkan perusahaan sawit dari hulu sampai hilir penuh ISPO

- Bagaimana petani?

Mentan pecat pejabat yang main proyek

- Siapa dia?



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: PT. PIHC

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat);

Layoutman : Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter :** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi :** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan :** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi :** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit : PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama :** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris :** Ir. Achmad Saubari Prasodjo

Direktur Utama : DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur :** Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

Email : redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit :** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak :** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga :** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan :** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran :** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN :** 0852-8586; **Percetakan :** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Hilirisasi Jalan Cepat jadi Negara Superpower

Hilirisasi produk pertanian merupakan jalan cepat Indonesia untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh secara global, bahkan menjadi negara superpower. Kekuatan sektor pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi, tetapi juga pada menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower. Contohnya, kelapa dalam yang semula hanya dijual Rp 1.350/kg bisa bernilai hingga Rp 145 ribu/liter jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO).

Komoditas lain seperti kakao dan mete juga bisa mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat. Bahkan, kelapa sawit kini telah diolah menjadi biofuel (B50) yang berfungsi sebagai pengganti solar. Jadi saya ajak generasi muda, khususnya mahasiswa S2 dan S3, dalam mendukung agenda hilirisasi melalui riset dan inovasi.

Pemerintah telah menyusun strategi investasi pertanian yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan investasi sebesar Rp 371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp 9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami menyoroti kondisi krisis pangan global yang tengah melanda 58 negara. Krisis pangan tak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik. Kalau kebijakan bermasalah, maka negara juga akan bermasalah. Karena itu, sektor pertanian harus diperkuat dari hulu ke hilir.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis. Diantaranya, refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, menyederhanakan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pertanian.

Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Data BPS mencatat bahwa produksi beras nasional pada Januari - Juli 2025 mencapai 21 juta ton, naik 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan USDA bahkan memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, melebihi target 32 juta ton.

Atas keberhasilan tersebut, FAO menganugerahkan Agricola Medal kepada Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari dunia internasional atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.

Saya berpesan, jika ingin menjadi pemimpin, harus mempunyai inovasi. Apalagi sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif bangsa Indonesia. Negara kita bisa menanam sepanjang tahun, air mengalir terus. Kalau kita kuat, dunia akan kehilangan pasarnya. Kita punya 280 juta penduduk, itu potensi besar.



PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Konsentrat, Rahasia Bobot Sapi Nambah Drastis

Konsentrat tepat jadi rahasia bobot sapi potong melonjak drastis! Simak cara cerdas memberi pakan agar sapi sehat, gemuk, dan untung peternak makin melimpah!



Di balik tubuh sapi potong yang tambun dan siap panen, tersembunyi satu rahasia yang mulai ramai diperbincangkan peternak yaitu konsentrat. Pakan berprotein tinggi ini bukan sekadar tambahan, tapi bisa jadi jurus pamungkas menaikkan bobot sapi secara cepat, efisien, dan menguntungkan.

Dalam dunia peternakan sapi potong, pakan bukan hanya kebutuhan dasar tetapi menjadi poros biaya yang menentukan untung atau buntung. Tak tanggung-tanggung, hingga 70 persen dari total biaya produksi bisa tersedot hanya untuk urusan makan. Di level peternak rakyat, tantangan ini makin terasa. Modal pas-pasan dan harga pakan yang tak bersahabat membuat mereka kerap memilih memberi pakan seadanya. Hasilnya? Sapi tumbuh lambat, panen tertunda, dan laba melayang entah ke mana.

Nah, di sinilah konsentrat hadir sebagai penyelamat. Pakan ini dikenal punya kandungan nutrisi super padat, protein, energi, vitamin, mineral semuanya ada. Bedanya dengan hijauan seperti rumput,

konsentrat punya daya cerna tinggi dan memberi energi instan ke ternak.

Sapi yang diberi konsentrat dengan takaran pas bisa mengalami lonjakan pertambahan berat badan harian (ADG) secara signifikan. Namun, bukan berarti konsentrat boleh mengusur peran hijauan. Seimbangkanlah! Ransum ideal tetap terdiri dari 60 persen konsentrat bahan kering dan 40 persen hijauan.

Teknik Pemberian Pakan

Agar manfaatnya maksimal, teknik pemberian pakan juga perlu diperhatikan. Hijauan sebaiknya dicacah pendek agar mudah dicerna, sementara konsentrat idealnya diberikan 2-3 jam sebelum hijauan. Trik kecil ini berpengaruh besar terhadap efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi di rumen sapi.

Yang menarik, peternak tak harus bergantung pada pakan pabrikan yang kadang bikin kantong menjerit. Konsentrat bisa diramu sendiri dari bahan lokal yang murah dan mudah dicari: dedak halus, bekatul, ampas tahu, polard, hingga bungkil kelapa.

Contohnya, untuk menghasilkan 100 kg konsentrat dengan

kandungan protein 14 persen, kombinasi berikut bisa dicoba: 10 kg bungkil kelapa, 30 kg bungkil jagung, 54,8 kg dedak halus, 0,5 kg tepung ikan, dan 0,2 kg mineral mix. Campur rata, simpan kering, dan siap pakai!

Dosis pemberian juga perlu diperhitungkan. Umumnya, konsentrat diberikan sebanyak 1-2 persen dari bobot sapi per hari.

Untuk sapi berbobot 400 kg, artinya butuh 4-8 kg konsentrat per hari, dibagi dua waktu: pagi dan sore. Tapi jangan serakah, pemberian berlebih justru bisa bikin pencernaan terganggu dan biaya jadi bengkak.

Berbagai studi dan praktik lapangan menunjukkan bahwa pemberian konsentrat yang cermat bisa mempercepat masa penggemukan, mempertinggi efisiensi biaya pakan, dan tentu saja, menaikkan harga jual sapi.

Berbagai studi dan praktik lapangan menunjukkan bahwa pemberian konsentrat yang cermat bisa mempercepat masa penggemukan, mempertinggi efisiensi biaya pakan, dan tentu saja, menaikkan harga jual sapi. Peternak di berbagai daerah mulai merasakan dampaknya. Sapi lebih cepat panen,

modal lebih cepat berputar, dan usaha pun berkembang.

Namun, strategi hebat ini perlu didampingi edukasi. Bukan cuma soal apa yang dimakan sapi, tapi juga soal bagaimana cara menyiapkannya. Di sinilah penyuluh peternakan punya peran vital. Mereka bisa membantu peternak menyusun ransum, mengenalkan alternatif bahan lokal, dan mengajarkan cara mencampur pakan dengan teknik sederhana. Dengan pendekatan yang partisipatif dan membumi, penyuluh bisa menjembatani kesenjangan pengetahuan antara ilmu dan praktik.

Ke depan, kolaborasi antara peternak, penyuluh, pemerintah, dan lembaga riset harus terus diperkuat. Dengan pemahaman yang lebih dalam soal konsentrat dan manajemen pakan, peternakan sapi potong bisa tumbuh mandiri, efisien, dan berdaya saing. Tak hanya menyejahterakan peternak, tapi juga mendukung ketahanan pangan nasional lewat pasokan daging yang sehat dan cukup.

Penulis: Inang Sariat
Penyuluh Pertanian Pusat

Presiden Panen Raya Jagung Serentak

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak. Orang nomor satu di Indonesia ini menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kemajuan pesat produksi pangan nasional, termasuk jagung yang produksinya meningkat hampir 50 persen di kuartal pertama 2025.

Presiden menyoroti kemajuan signifikan yang diraih Indonesia dalam bidang produksi pangan, khususnya beras dan jagung. Ia menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif, bahkan saat banyak negara lain tengah mengalami krisis pangan, terutama beras.

"Hari ini saya merasa bahagia. Kita sudah melihat tanda-tanda keberhasilan dalam produksi pangan, dan kita tidak boleh cepat puas. Tapi kita juga harus objektif, bahwa hasil nyata telah kita capai. Ini bukan keberhasilan yang jatuh dari langit, tapi hasil dari kerja keras, inisiatif, dan hati yang bersih," ujar

Presiden Prabowo pada acara panen raya jagung serentak di kuartal II tahun 2025, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kamis (5/6).

Panen jagung yang berlangsung di berbagai wilayah diantaranya Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan daerah lainnya merupakan hasil kerja keras lintas sektor, termasuk dukungan strategis dari Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia. Keterlibatan aktif institusi-institusi negara dalam pembangunan pangan disebut Presiden sebagai bagian dari kesadaran kolektif untuk menjadikan Indonesia semakin mandiri.

Presiden menyampaikan optimisme tinggi bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi perlu mengimpor jagung. Dengan produktivitas yang terus meningkat dari rata-rata 4 ton/ha kini mencapai 6-8 ton/ha. Artinya Indonesia semakin dekat menuju kemandirian jagung nasional.

Keberhasilan ini turut ditopang pemanfaatan benih unggul hasil dalam negeri, serta penggunaan

pupuk organik yang semakin meluas di kalangan petani. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa Indonesia tidak hanya sedang mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dalam sektor pertanian.

"Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus. Pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis," tegasnya. Karena itu, Presiden menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berkontribusi besar dalam upaya percepatan ketahanan pangan nasional.

Namun Presiden Prabowo menegaskan, target Indonesia bukan hanya sebatas swasembada pangan, melainkan menjadi pemain global dalam menjawab krisis pangan dunia. "Cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan," ujarnya. **Yul**





ERA BARU TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI

Pasca terbitkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025. Lahirnya, regulasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sarana produksi yang sangat vital bagi petani.



Tata kelola pupuk bersubsidi kerap menimbulkan keluhan di lapangan, terutama ketika petani mengeluhkan keberadaan sarana produksi tersebut tak sampai ke tangan mereka. Padahal di satu sisi, musim tanam telah tiba dan kegiatan pemupukan tak bisa ditunda lagi. Persoalan tersebut yang kini pemerintah benahi. Apalagi di sisi lain, pemerintah juga tengah mempercepat swasembada pangan.

Untuk mengatasi semua hambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan.

Deputi bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Pangan, Widiastuti mengatakan, pemerintah melakukan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi. Alasannya, selama ini banyak peraturan dalam pupuk subsidi mencapai 145 peraturan, 41 Undang-Undang, 23 Peraturan Pemerintah, serta 6 Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden.

"Dengan banyaknya regulasi pengadaan pupuk subsidi, pemerintah lalu melakukan pemangkasan, sehingga dapat cepat dan langsung diterima petani," katanya saat Webinar Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Subsidi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia, Rabu (11/6).

Dalam Perpres No. 6 Tahun 2025, Widiastuti mengungkapkan, Menko Pangan mendapatkan amanah melaksanakan fungsi sinkronisasi,

koordinasi dan pengendalian agar tata kelola pupuk menjadi lebih baik, dari mulai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Tindak lanjut Perpres, Menko Pangan mengeluarkan Keputusan No. 6 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi.

Pokja bertugas melakukan pengawasan pupuk bersubsidi meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok. "Karena pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, maka pengawasan fokus pada prinsip 7 T," katanya seraya menambahkan bahwa pengawasan juga terhadap akuntabilitas keuangan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang akan dilakukan BPKP.

Terbitnya Permentan

Sebagai tindak lanjut Perpres No. 6 Tahun 2025, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan No. 15 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksana. Terdapat paradigma baru dalam sasaran tata kelola pupuk bersubsidi. Sebelumnya, sasaran tata kelola pupuk bersubsidi untuk memastikan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi memenuhi 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu).

"Jika dulu kita hanya tetapkan 6 T, kini dengan Permentan yang baru ini, azas tersebut berubah menjadi 7 tepat, Tambahan 1 T, Tepat Penerima," kata Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra.

Dengan terbitnya Permentan terbaru tersebut, program pupuk bersubsidi dialokasikan tidak

hanya untuk usaha pertanian, tapi juga perikanan. Untuk pertanian, pupuk bersubsidi ditujukan petani yang berusaha di 10 komoditas yang memiliki lahan paling luas 2 hektar (ha). Komoditas tanaman pangan yakni padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Usaha tani subsektor hortikultura yakni, cabai, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan subsektor perkebunan untuk petani tebu rakyat, kakao dan kopi.

Paradigma baru lainnya adalah bertambahnya pelaku yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sebelumnya hanya pengecer dalam bentuk Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang berperan sebagai penyalur pupuk bersubsidi ke petani. Tapi dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang baru terdapat penambahan yang berperan menjadi Titik Serah sebagai penerimaan pupuk bersubsidi.

Siapa saja? Mereka adalah Pengecer, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran pupuk. "Siapa pun, termasuk koperasi yang memenuhi persyaratan dalam penyaluran pupuk bersubsidi bisa mendaftar menjadi bagian dari titik serah," kata Jekvy.

Nantinya ungkap Jekvy, PT Pupuk Indonesia bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke Titik Serah. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN Pupuk untuk dan atas nama produsen dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi. Distributor yang kini bertransformasi menjadi pelaku usaha distribusi inilah yang akan menjembatani antara BUMN Pupuk dengan Titik Serah dalam proses bisnis pupuk bersubsidi.

Pembaharuan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan No. 15 tahun 2025 adalah BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh

terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios, gapoktan, pokdakan dan koperasi). Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi di wilayah tanggung jawabnya.

"Dengan adanya Perpres dan Permentan, semua tanggung jawab distribusi ada di Pupuk Indonesia. Distributor berada di bawah naungan Pupuk Indonesia, termasuk teknis ketersediaan pupuk sampai ke lokasi. Jadi pupuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi," katanya.

Sementara itu, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman mengatakan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional sampai 10 Juni 2025 baru mencapai 36,29% atau 3,7 juta ton dari alokasi kontrak sebanyak 9 juta ton dan 34,30% dari alokasi Kepmentan sebesar 9,5 juta ton.

Dibandingkan tahun 2024 Deni melihat, penyaluran tahun 2024 yang hanya 2,64 juta ton jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3,28 juta ton. Hal ini karena Kementerian Pertanian memang sejak awal tahun lalu mendorong penyaluran pupuk bersubsidi. "Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi tersebut membuat kami berusaha jangan sampai ada penurunan penyerapan pupuk petani," katanya.

Untuk menyelaraskan Perpres dan Permentan Tata Kelola Pupuk, PT. Pupuk Indonesia menunjuk Pelaku Usaha Distribusi (PUD) untuk menyalurkan pupuk ke petani. "Kami juga telah menyiapkan stok di gudang pelaku usaha distribusi dan di gudang pengecer. Kami memang masih mempertahankan pengecer existing untuk membantu penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani," katanya. **Yul**

Pengawasan Diperketat, Distribusi Tepat Sasaran



Terbitnya Peraturan Presiden N0. 6 Tahun 2025, lalu disusul Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 mengubah tata kelola pupuk bersubsidi. Sebagai barang dalam pengawasan, setiap alur distribusi pupuk bersubsidi akan mendapat pengawasan secara ketat lintas kementerian dan lembaga.

Pengawasan pupuk bersubsidi kini kian ketat, pemantauan menyeluruh dan evaluasi transparan demi stabilitas harga dan ketersediaan sarana produksi vital bagi petani. Dengan berlakunya Perpres No 6 Tahun 2025, pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pupuk bersubsidi.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kemenko Perekonomian, Widiastuti mengatakan, implementasi Perpres ini akan menjadi babak baru pengelolaan pupuk bersubsidi secara transparan dan akuntabel. "Dengan lahirnya Perpres 6/2025 dan Keputusan Menko Pangan No. 6 Tahun 2025, kita menetapkan kerangka kerja yang solid untuk pemantauan dan evaluasi pupuk bersubsidi secara nasional," ujarnya.

Widiastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi mengatakan, dalam Perpres ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tapi juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kementerian/lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait.

Secara lebih rinci, pengawasan dilakukan terhadap sasaran penerima pupuk subsidi, jenis komoditas peruntukan, jenis dan mutu pupuk, jumlah pupuk yang disalurkan, Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), ketersediaan dan distribusi stok.

"BPKP berperan penting dalam melakukan audit keuangan terhadap proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sementara Kementan dan KKP akan berfokus pada pengawasan teknis dan lapangan sesuai sektor masing-masing," tutur Widiastuti saat webinar "Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi", yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Pupuk Indonesia, pada Rabu (11/6).

Tak hanya distribusi fisik, menurut Widiastuti, pengawasan juga menyentuh aspek teknologi dan sistem pelaporan. Karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap Sistem Informasi Pupuk Bersubsidi, mulai dari data penerima hingga hasil distribusi di tingkat kecamatan. "Integrasi data dan pelaporan antar lembaga menjadi kunci agar distribusi pupuk bisa lebih cepat, tepat, dan akurat, serta

terhindar dari penyalahgunaan," ungkapnya.

Kembali Aktifkan KP3

Menariknya, dalam Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) No. 633 Tahun 2024, pemerintah sebelumnya telah menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai wadah koordinatif antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nah, dengan terbitnya Perpres No. 6 Tahun 2025, peran KP3 makin diperluas.

Dirjen PSP Kementan dan Dirjen Perikanan Budidaya KKP akan menerbitkan dua petunjuk teknis (juknis) untuk menyesuaikan pelaksanaan pengawasan sesuai struktur baru yang ditetapkan. "Melalui KP3, keterlibatan unsur dinas pertanian, perikanan, koperasi, dan lembaga lain di daerah akan semakin diperkuat. Sinergi ini krusial untuk menjamin pupuk subsidi sampai ke petani yang berhak," kata Widiastuti.

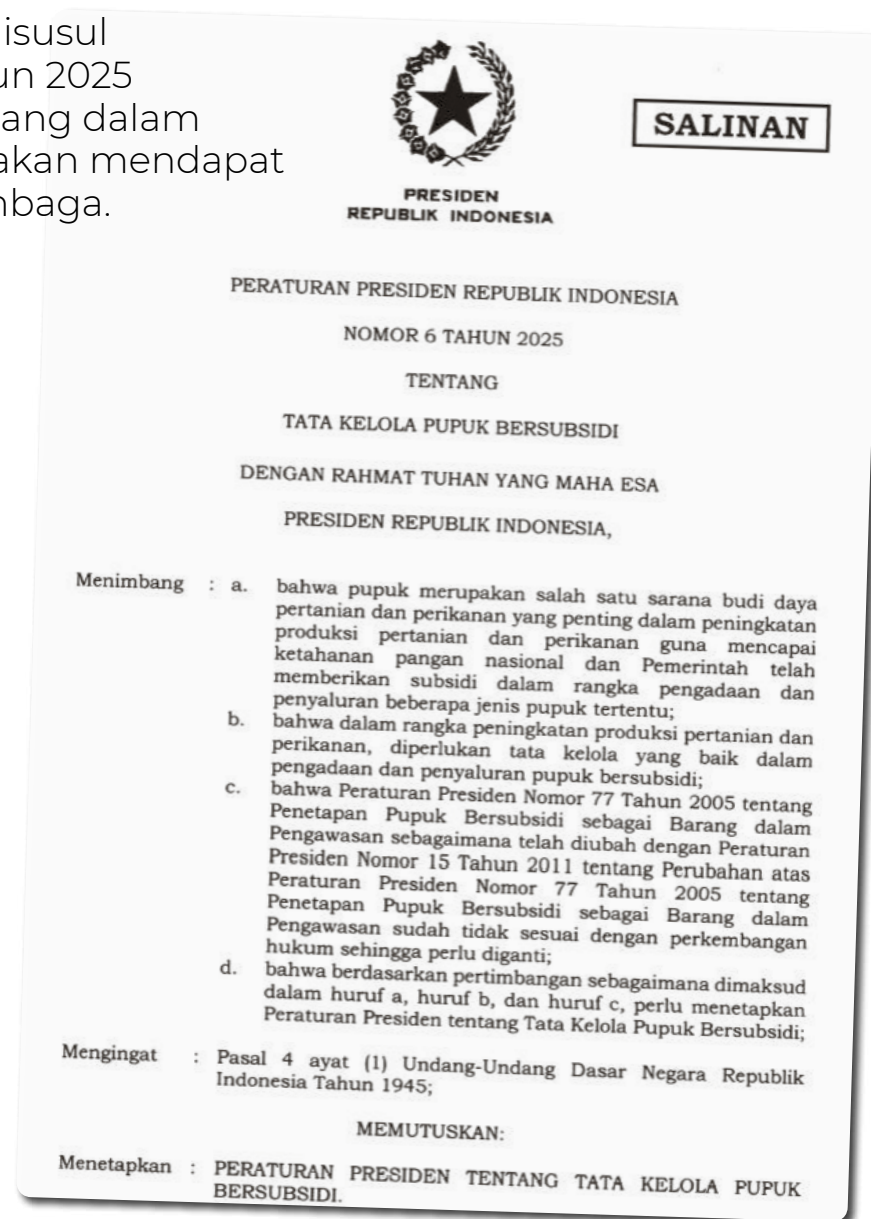
Dalam Permentan No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi disebutkan, Menteri Pertanian dan Menteri KKP tetap menjadi pelaksana utama pengawasan, namun kini koordinasinya lebih diperluas. "Kita tidak mulai dari nol. Kita menyempurnakan sistem yang ada. Yang membedakan sekarang adalah struktur pengawasan yang lebih sistemik, lintas sektor, dan berbasis data," tambahnya.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinatif, pemerintah berharap distribusi pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Petani kecil dan nelayan budidaya yang selama ini kesulitan mendapat akses pupuk bersubsidi, akan lebih mudah terlayani dan tidak lagi terpinggirkan.

"Tujuan akhirnya jelas, menjamin ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Kami ingin subsidi pupuk benar-benar sampai ke tangan yang tepat, bukan bocor di tengah jalan," tegas Widiastuti.

Dalam kebijakan ini, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat. Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai pusat kendali sinkronisasi sangat vital. "Fungsi kami di Kemenko adalah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, kami sebut Siskondal. Kami ubah Perpres pupuk, lakukan rakor, dan integrasi sistem informasi. Semua agar subsidi tepat sasaran," paparnya.

Perubahan besar ini didasari Keputusan Menko Pangan No.



6 Tahun 2025 yang membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Kelompok kerja ini melibatkan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Lembaga

pengawas dan unsur masyarakat. Tujuannya? Bukan hanya memantau, tapi juga mengevaluasi, merekomendasikan revisi, dan mengawal proses distribusi agar tak melenceng. **Gsh/Yul**

Bikin Ribet, Regulasi pun Dipangkas

Distribusi pupuk subsidi kerap mendapat keluhan dari petani. Dari hasil evaluasi tata kelola pupuk subsidi, ternyata ada 145 aturan berlapis dari berbagai kementerian yang bikin proses penyaluran jadi lambat dan rumit.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kemenko Perekonomian, Widiastuti mengatakan, penyebab utama keterlambatan tersebut yakni tumpukan regulasi yang tidak sinkron. Akibatnya, kebutuhan pupuk yang seharusnya tersedia saat masa tanam, justru baru tiba saat panen. "Jadi, tidak tepat waktunya," ujarnya.

Hasil evaluasi, ditemukan fakta proses penyaluran pupuk subsidi terhambat prosedur yang berbelit-belit dan melibatkan banyak aturan dari berbagai instansi. Dari 145 peraturan yang mengatur dari produksi sampai distribusi. Kementerian Pertanian memiliki 11 aturan, Kementerian Perdagangan (6 aturan), Kementerian Lingkungan Hidup (5 aturan), Kementerian Tenaga Kerja (9 aturan).

Belum lagi regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (5 aturan), Kementerian Perindustrian (8 aturan), Kementerian Perhubungan (6 aturan), Kementerian BUMN (7 aturan), Kementerian Agraria dan Kementerian Hukum dan HAM masing-masing 5 aturan.

Alur distribusi pupuk subsidi pun ternyata panjang dan kompleks. Banyaknya tahapan yang harus dilalui, ditambah regulasi tumpang tindih dari lintas kementerian menyebabkan terjadi *bottleneck*. Karena itu, pemerintah melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses, termasuk sinkronisasi antar lembaga. **Gsh/Yul**



Perombakan Besar Tata Kelola Pupuk Bersubsidi



Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 memberikan perubahan cukup besar terhadap tata kelola pupuk bersubsidi. Dari mulai sasaran hingga komoditas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi mengalami penambahan.



POIN PERUBAHAN TATAKELOLA PUPUK BERSUBSIDI

	Sebelum Perpres 06/2025	Pasca Perpres 06/2025
Sasaran	6 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu)	7 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, & penerima)
Penerima	Petani, LMDH tergabung Poktan	Petani, LMDH, Pembudidaya Ikan tergabung Poktan
Jenis Pupuk	Urea, NPK, Organik	Urea, NPK, Organik, SP-36, & ZA
Impor	Belum Diatur	Ditetapkan pada Rakor Menko Pangan
Penetapan Alokasi	Rakor Menko Ekon, Kepmentan, SK Gub, & SK Bup	Rakor Menko Pangan, Kepmentan, SK Kadistan Prov, & SK Kadistan Kab/Kota
Tahapan Penyaluran	BUMN Pupuk – Distributor – Pengecer – Poktan/Petani	BUMN Pupuk (Pelaku Usaha Distribusi) – Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi) – Petani
Verval	Kementan	Kementan dan KKP
Sektor	Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Pertanian (Tanaman Pangan*, Hortikultura, dan Perkebunan) dan Perikanan Budidaya

Keterangan :

* Tambahan komoditas ubi kayu sebagai penerima pupuk bersubsidi subsektor tanaman pangan

1. Kementerian Pertanian 2. Kementan 3. Kementerian 4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia 5. www.pupuk.go.id

2



Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah berharap penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. "Ada beberapa poin perubahan tata kelola pupuk bersubsidi," kata Direktur Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Jeky Hendra saat webinar Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (11/6).

Misalnya, untuk sasaran. Jika kebijakan sebelumnya sasaran penyaluran pupuk bersubsidi menganut prinsip 6 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu), maka kini bertambah menjadi 7 Tepat yakni Tepat Penerima. Kemudian untuk penerima, peraturan sebelumnya yang berhak menerima pupuk bersubsidi hanya petani dan LMDH (Lembaga Masyarakat Dekat Hutan) yang tergabung dalam kelompok tani, kini ditambah pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan.

Untuk jenis pupuknya juga ditambah. Jika sebelumnya hanya urea, NPK dan organik, maka kini ditambah SP3 dan ZA. Dalam penyaluran juga lebih singkat. Sebelumnya dari BUMN Pupuk melalui distributor, kemudian ke pengecer dan ke Poktan/Petani. Namun kini dari BUMN Pupuk melalui pelaku usaha distribusi langsung ke titik serah yakni, pengecer, gapoktan, pokdakan, koperasi lalu ke petani.

"Ada penetapan lokasi, tahap penyaluran, kemudian sistem verwal dan sektor-sektor yang lain. Ini semua dilakukan perubahan terhadap tata kelola," katanya. Namun, Jeky melihat, inti dari semua perubahan atau deregulasi

tata kelola pupuk bersubsidi adalah memangkas segala jenis peraturan yang selama ini membelenggu untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Salah satunya menurut Jeky adalah memangkas peraturan di Pemerintah Daerah. Jika sebelumnya penetapan alokasi pupuk harus menunggu Bupati dan Gubernur, maka kini cukup dengan menggunakan surat Kepala Dinas terkait sudah bisa menentukan dan menetapkan alokasi pupuk subsidi.

Perubahan penting lainnya dalam tata kelola pupuk subsidi, khususnya di daerah ungkap Jeky adalah sistem realokasi. Dahulu realokasi memerlukan waktu satu kali dalam satu tahun, kemudian dalam prosesnya tidak bisa mengakomodir dinamika dan persoalan yang ada. Namun, kini dinamika dan persoalan di setiap kabupaten ataupun provinsi yang muncul akan diakomodasikan. "Ini juga akan kita lakukan perubahan dalam Permentan No. 15 Tahun 2025," ujarnya.

Begitu juga mengenai konsep e-RDKK. Jeky mengatakan, selama ini banyak daerah dan kabupaten dalam mengajukan e-RDKK hanya berdasarkan kepada alokasi. Namun kini alokasi bukan menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebutuhan pupuk bersubsidi.

"Penentuan jumlah pupuk yang diberikan petani adalah dalam e-RDKK. Jadi silakan semua petani yang wajib dan memenuhi persyaratan petunjuk teknis untuk mendaftarkan," katanya.

Bahkan, lanjut Jeky pemerintah membuka kesempatan mengajukan perubahan e-RDKK kepada Dinas Pertanian kapanpun untuk mengajukan kebutuhan petani secara kolektif. Jadi perubahan e-RDKK bisa terjadi setiap saat, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. "Pergeseran alokasi pupuk itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama, mungkin hanya sekitar 2-3 hari, untuk tingkat nasional paling lama 45 hari," katanya.

Peran Distributor

Dengan lahirnya Permentan No. 15 Tahun 2025, semua peraturan pemerintah mengenai tata kelola pupuk, termasuk Permendag No. 4 Tahun 2023 dan Permentan No. 10 Tahun 2022, sudah diakomodir dalam Permentan terbaru. Salah satu yang penting menurut Jeky adalah dalam distribusi pupuk bersubsidi, khususnya peran distributor. Karena menjadi bagian entitas penyaluran di lapangan, jika ada permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan, maka kesalahan berada di distributor.

Namun dengan adanya Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Permentan No. 15 Tahun 2025, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia. "Segala sesuatu yang berkaitan mengenai mekanisme dan proses penyaluran pupuk bersubsidi ke petani melalui titik serah menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia," katanya.

Bagaimana dengan distributor? Jeky mengatakan, mereka nantinya berada langsung di bawah Pupuk Indonesia yang menjadi penentu teknis di lapangan. Jadi Pupuk Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap entitas dalam

distribusi pupuk sampai ke titik serah dan ketersediaan pupuk yang ada di setiap lokasi. "Ini sudah kita buktikan sampai hari ini, seluruh kota/kabupaten dari Januari sampai Juni, ketersediaan pupuk bersubsidi terjamin di lapangan," katanya.

Dalam Permentan No. 15 Tahun 2025, Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk pelaku usaha distribusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pelaku Usaha Distribusi tersebut merupakan badan usaha yang ditunjuk BUMN Pupuk untuk dan atas nama produsen berdasarkan SPJB diperluas.

Dengan demikian, menurut Jeky, kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan, gabungan kelompok tani dan koperasi desa merah putih bisa menjadi distributor pupuk bersubsidi, asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Untuk SPJB yang terkait dengan pengadaan dan penjual pupuk bersubsidi yang telah ditentukan sebelum Permentan baru, tetap dapat dilaksanakan dan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Permentan paling lambat pada 30 Juni tahun 2025," tuturnya. **Yul**

5 Lokasi jadi Pilotting Permentan

Sebelum dilaksanakan secara nasional, Pemerintah akan melakukan uji coba implementasi Perpres No 6 tahun 2025 dan Permentan No. 15 tahun 2025. Direnakan pilotting dilaksanakan di 5 provinsi dengan 5 kabupaten yakni Jawa Timur (Madiun), Lampung (Lampung Tengah), Yogyakarta (Gunung Kidul), Jawa Tengah (Grobogan) dan Sulawesi Selatan (Sidenreng Rappang).

Saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, serta 406 Koperasi yang sudah bergabung sebagai kios/penyalur pupuk bersubsidi. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian telah mengusulkan 334 Gapoktan, sebanyak 142 Gapoktan sedang diverifikasi PT Pupuk Indonesia (115 belum badan usaha, 24 koperasi, dan 3 PT). Sementara Kementerian Koperasi mengusulkan 21 koperasi untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi dan sudah siap di lokasi *pilotting*.

Saat ini juga tengah dilakukan kajian margin fee distributor dan pengecer. Selama ini margin fee belum berubah sejak 2010. Untuk distributor Rp50/kg dan pengecer Rp75/kg. "Kajian akan dilakukan Pusat Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian. Tujuan kajian peningkatan margin atau fee distributor dan pengecer," kata Direktur Pupuk, Ditjen PSP, Jeky Hendra. **Yul**

Pupuk Indonesia Jamin Pupuk untuk Petani



PT Pupuk Indonesia (Persero) terus bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi yang berlaku mulai tahun ini. Sebagai implementasi Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Permentan No. 15 Tahun 2025, perusahaan plat merah tersebut menjamin ketersediaan pupuk untuk petani.



Sejak berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 sebagai turunan dari Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025, BUMN Pupuk ini langsung melakukan pembenahan menyeluruh demi memastikan distribusi pupuk tetap lancar dan tepat sasaran. Data Pupuk Indonesia, hingga 10 Juni 2025 penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 3,176 juta ton atau sekitar 34 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

"Kami terus mengakselerasi penyaluran pupuk agar bisa menjangkau seluruh wilayah pertanian tepat waktu. Realisasi penyaluran hingga Juni ini sudah mencapai lebih dari 3 juta ton, dan kami pastikan distribusi berjalan

lancar di tengah perubahan tata kelola," kata SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman saat webinar Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Rabu (11/6).

Rincian penyaluran hingga kini mencakup 1,5 juta ton pupuk Urea, 1,6 juta ton NPK, serta 99 ribu ton pupuk organik. Capaian ini tegas Deni, menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran pasokan bagi petani, terutama menjelang musim tanam berikutnya. "Kami tidak ingin perubahan regulasi ini justru menghambat akses petani terhadap pupuk. Karena itu, strategi penyaluran kami rancang sejak awal tahun, termasuk pemetaan wilayah dengan potensi serapan tinggi," katanya.

Tak hanya itu, sejak 1 Januari 2025 sistem penebusan pupuk subsidi sudah mulai diberlakukan secara digital. Hal ini memungkinkan proses

distribusi menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien. "Tahun ini bisa dibilang kami *gas pool* sejak awal. Seluruh infrastruktur logistik dan sistem pendukung sudah kami siapkan jauh hari," ujarnya.

Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran pupuk bersubsidi kali ini jauh lebih terarah dan masif. Selama musim tanam Oktober 2024 hingga Maret 2025, penyaluran mencapai hampir 4 juta ton, angka yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir. Hal ini turut berdampak pada peningkatan cadangan beras nasional yang kini mencapai 4 juta ton, sebagaimana tercatat oleh Bulog.

Dari sisi ketersediaan, stok pupuk di lapangan juga dipastikan dalam kondisi aman. Per 10 Juni 2025, stok nasional Urea mencapai 1,2 juta ton, sementara NPK mencapai 800 ribu ton. Untuk Urea subsidi, tercatat ada 651.721 ton yang 316 persen lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan pemerintah melalui Permendag No. 4 Tahun 2023. Sedangkan stok NPK subsidi mencapai 727.204 ton, atau 292 persen di atas batas minimum.

"Stok tidak hanya tersedia di pusat, tapi juga kami pastikan terdistribusi hingga lini gudang terdepan. Kesiapan ini menjadi fondasi penting agar penyaluran tetap stabil," katanya. Bahkan dalam distribusi, Deni mengungkapkan, Pupuk Indonesia didukung 1.218 Pelaku Usaha Distribusi (PUD) yang

tersebar di seluruh Indonesia. Di gudang-gudang PUD, saat ini tersedia sekitar 40 ribu ton pupuk dari berbagai jenis. Tak hanya itu, 27.672 titik serah pengecer juga telah dipersiapkan dengan total stok mencapai 290 ribu ton lebih.

Menanggapi sistem distribusi baru berdasarkan Permentan No. 15/2025, Pupuk Indonesia kini memiliki keleluasaan dalam menentukan skema penyaluran. Pupuk dapat disalurkan melalui PUD atau langsung ke titik serah, tergantung kebutuhan di lapangan. "Sekarang PUD bukan hanya mitra, tapi bagian dari ekosistem kerja kami. Kalau ada keterlambatan pengiriman dari PUD, itu jadi perhatian kami. Kami akan evaluasi dan pantau ketat kinerjanya," tegasnya.

Perubahan paradigma ini, menjadi bukti bahwa Pupuk Indonesia siap melakukan transformasi internal demi memastikan tata kelola pupuk yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan petani. Komitmen utama tetap sama, menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk hingga ke tangan petani. "Kami bertanggung jawab penuh hingga titik serah. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal kepercayaan. Pupuk bersubsidi adalah hak petani, dan kami pastikan hak itu sampai tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup," tutupnya. **Herman/Yul**

Alokasi Masih Kurang, Jatim Distribusikan secara Proporsional

Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pemerintah telah memperbarui regulasi untuk mempercepat dan mempermudah prosesnya.



Ketua Tim Kerja untuk Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Mochamad Affandi mengatakan, dalam Penyaluran pupuk, pihaknya berpedoman pada sejumlah regulasi baru. Adanya regulasi baru ini, proses pengusulan dan penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih cepat.

"Tidak perlu lagi menunggu tanda tangan gubernur atau bupati, cukup kepala dinas saja yang menandatangani. Ini sangat membantu mempercepat proses di lapangan," ujarnya saat webinar Kupas Tuntas Permentan Pupuk Bersubsidi di Jakarta, Rabu (11/6).

Namun, meski sistem administrasi dipermudah, tantangan substansial tetap ada. Realisasi alokasi pupuk yang diterima Jawa Timur masih jauh dari harapan. Dari total usulan melalui e-RDKK, hanya sekitar 62,97 persen yang disetujui. Rinciannya, realisasi pupuk urea mencapai 84,36 persen, NPK 58,14 persen, NPK formula khusus 83,07 persen, dan pupuk organik hanya 30,09 persen dari total yang diajukan.

"Kalau melihat kebutuhan petani dan luas lahan yang kami tangani, angka itu masih sangat kurang. Terutama pupuk organik, yang hanya dipenuhi 30 persen dari usulan. Kami harap ada penambahan alokasi dari

pusat," tegasnya. Secara nasional, Jawa Timur menerima jatah sekitar 19,73 persen dari total pupuk subsidi. Untuk urea mencapai 20,29 persen, NPK 18,38 persen, dan organik 31,75 persen.

Namun, besarnya persentase ini belum tentu mencerminkan kecukupan di daerah karena permintaan riil petani masih jauh lebih besar. "Kami terus berupaya melakukan re-alokasi, terutama dari kabupaten yang serapan pupuknya rendah ke daerah yang serapannya tinggi, agar pupuk yang ada benar-benar dimanfaatkan secara maksimal," kata Affandi.

Hingga kini penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur baru mencapai sekitar 36,6 persen. Angka ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesiapan petani menghadapi musim tanam. Karena itu, pemerintah daerah kini terus menggenjot realisasi sambil melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. **Herman/Yul**

Bersiap Hadapi Musim Kemarau

Setelah musim hujan yang cukup panjang selama tahun 2025, petani di Tanah Air akan menghadapi musim kemarau. Sejauh mana kondisi musim kemarau tahun ini dan persiapan pemerintah menjaga stok pangan? Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi Pembahasan Program Pompanisasi dan Irigasi Pertanian di Kampus Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/6).

Di tengah kondisi iklim yang sulit ditebak, pemerintah mengambil langkah dini mempersiapkan kondisi musim kemarau, terutama dampaknya terhadap produksi pangan. Seperti diketahui, pemerintah saat ini terus menggenjot produksi pangan, khususnya padi dan jagung. Bahkan bendera target swasembada pangan telah dikibarkan tinggi.

Bersinergi menjaga produksi pangan di musim kemarau 2025, salah satu yang pemerintah lakukan adalah memperkuat sistem irigasi dan program pompanisasi di sentra-sentra produksi pertanian. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, mulai Juni hingga Oktober, Indonesia sudah memasuki musim kemarau sehingga curah hujan diprediksi akan sangat rendah.

Kondisi ini menurutnya, berisiko menyebabkan kekeringan lahan, keterbatasan pasokan air irigasi, penurunan luas tanam, serta ancaman gagal panen di sejumlah daerah. "Kita akan menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni sampai Oktober, hujan minim," katanya.

Pada saat itu menurut Amran, produksi harus dijaga. Sebab, pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi. "Untuk itu tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal," tegasnya.

Amran mengakui, selama ini ada kesenjangan pembangunan infrastruktur irigasi dari tingkat pusat hingga daerah telah lama menjadi hambatan. Tak jarang, infrastruktur primer dibangun pusat, namun jaringan sekunder dan tersier diabaikan oleh provinsi dan kabupaten, sehingga aliran air tidak mencapai lahan pertanian secara optimal.

"Dulu Inpres Irigasi sering tidak sinkron. Kabupaten perbaiki tersier, provinsi tidak bangun sekunder. Pusat bangun primer, daerah tidak bisa lanjutkan. Akibatnya, meski dana triliunan rupiah digelontorkan untuk bendungan dan saluran air, hasilnya minim. Luas tanam stagnan di angka 10 juta hektare tiap tahun," ungkap Amran.

Sebagai langkah konkret, Presiden Republik Indonesia telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp12 triliun untuk

peningkatan infrastruktur irigasi di area seluas 2 juta ha. Pada tahun 2025, penguatan irigasi difokuskan pada lahan intensifikasi seluas 851 ribu ha (optimalisasi lahan), 1 juta ha sawah tadah hujan, serta 500 ribu ha ekstensifikasi lahan baru.

Saat ini menurut Amran, pompanisasi juga sudah disebar di 80 ribu titik diseluruh Indonesia baik di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa. Menyikapi hal ini, ia meminta pompanisasi dan lokasi irigasi didata lagi dengan baik. Selain itu, program ini dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan aliran air dari bendungan hingga ke lahan petani tidak terputus.

"Pompanisasi bukan sekadar solusi darurat, tapi strategi jangka menengah untuk stabilkan produksi pangan. Tahun lalu, saat puncak El Nino, produksi justru naik 2 juta ton. Artinya, kita bisa mengurangi dampak iklim jika kerja sama dan sistem irigasi berjalan dengan baik dan pompanisasi," tambah Amran.

Peran Pemda

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodomengatakan, pihaknya siap mendukung program swasembada pangan. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025, yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membangun irigasi sekunder dan tersier.

Saat ini, Dody mengatakan, KemenPU berkolaborasi dengan Kementan terus mengerjakan perbaikan irigasi dan membangun irigasi dititik yang sudah didata. Karena itu, ia berharap Sekda, Kepala Dinas Pertanian itu juga ikut bekerja maksimal. "Tanpa mereka, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang tahu kondisi irigasi di kota maupun di kabupaten itu mereka," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja bersama dalam

menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi. Hal ini sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, utamanya menjaga produksi beras ditengah tantangan musim kemarau 2025.

"Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing, sehingga memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air," tutur mantan Kapolri ini.

Tito juga menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di provinsi dan kabupaten/kota untuk turun langsung mengecek kondisi lahan dan ketersediaan air di daerah masing-masing. "Saya minta kepala daerah segera melakukan rapat internal khusus untuk membahas kesiapan dan kondisi air di wilayahnya baik provinsi, kabupaten/kota. Karena nanti kita akan melakukan evaluasi didepan," tegasnya. **Yul**

Ini Prediksi BMKG

Analisis terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menunjukkan sebanyak 403 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 57,7 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. BMKG mengungkap wilayah Nusa Tenggara diperkirakan menjadi wilayah yang paling awal mengalami musim kemarau dibandingkan wilayah lain.

Dalam laporan Prospek Cuaca Mingguan Periode 16-22 Mei 2025, secara keseluruhan, musim kemarau tahun ini diprediksi datang bersamaan atau lebih lambat dari normalnya di 409 ZOM (59 persen). Meski demikian, akumulasi curah hujan selama musim kemarau diperkirakan berada pada kategori normal,



tanpa kecenderungan lebih basah atau lebih kering.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut awal musim kemarau dimulai pada April dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Awal musim kemarau di Indonesia diprediksi tidak terjadi secara serempak. Pada April 2025, sebanyak 115 (ZOM) akan memasuki musim kemarau.

"Jumlah ini akan meningkat pada Mei dan Juni, seiring meluasnya wilayah yang terdampak, termasuk sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua," ujarnya. BMKG memprediksi puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan akan berlangsung lebih singkat dari biasanya pada 298 ZOM (43 persen wilayah RI). **Yul**



Ada Apa dengan Pasar Induk Beras Cipinang?

Kondisi Pasar Induk Besar Cipinang (PIBC), Jakarta Timur tiba-tiba bergejolak. Sekitar 11 ribu ton beras dalam satu hari keluar dari pasar yang selama ini sebagai patokan perdagangan beras di Indonesia. Padahal selama ini hanya sekitar 2 ribu hingga 5 ribu ton perhari.

Anomali dalam distribusi beras di PIBC tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, data stok beras di PT Food Station Tjipinang, ada ketidakwajaran dengan keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari yaitu pada 28 Mei 2025.

Tercatat sebelumnya stok beras di BUMD DKI Jakarta memiliki tren yang terus meningkat terlebih sejak tahun 2024 dikisaran 30-40 ribuan ton. Bahkan pada tahun 2025 mampu menembus kisaran 50 ribu ton. Sementara arus masuk dan keluar beras di PIBC cenderung stabil dan berimbang dengan rata-rata sirkulasi masuk-keluar beras sebesar 2.000-3.000 ton per hari.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun mempertanyakan hal tersebut. Angka beras keluar 11.410 ton per hari merupakan lonjakan drastis yang memunculkan tanda tanya besar. "Masuk akal gak? Ini 11.000 keluar satu hari," katanya saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/6).

Mentan menduga, ada upaya menggiring opini bahwa stok beras kurang. Kemudian harga naik, lalu pemerintah mengeluarkan beras SPHP. Setelah beras yang pemerintah tersebut dikeluarkan Bulog, oknum tersebut akan membeli beras SPHP dan mencampur dengan beras medium. Lalu mereka menjualnya dengan harga premium.

Jika ada pihak yang memainkan distribusi atau laporan stok secara sengaja dan hal itu benar, maka Arman menegaskan, merupakan bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. "Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali. Ini harus

diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi," tegasnya.

Untuk itu, Mentan Amran mendorong Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dan mencederai perjuangan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan dalam negeri.

"Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati berproduksi. Kita setengah mati bantu petani," ucapnya. Karena itu, Amran menekankan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan petani dan konsumen, termasuk dugaan permainan harga dan manipulasi stok pangan oleh mafia.

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Mabes Polri kini tengah mendalami indikasi permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusi pangan di PIBC, Jakarta. "Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus dampingi. Jangan ada segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia," kata Amran saat Tabloid Sinar Tani berkunjung ke kediamannya, Rabu (4/6).

Investigasi Satgas Pangan

Untuk mengetahui kepastian anomali tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri langsung turun ke lapangan. Investigasi satgas pangan yang dilakukan Rabu (4/6) yang dipimpin Brigjen Pol. Djoko

Prihadi dan Brigjen Pol. Kurniawan Affandi mengungkap pasokan beras di PIBC dalam kondisi normal dan mencukupi.

Sebelumnya, Ketua Koperasi Pedagang Beras Cipinang Zulkifli Rasyid sempat menyarankan agar pemerintah segera menyalurkan kembali stok beras impor yang masih tersimpan di gudang Bulog sebanyak 1,3 juta ton. Artinya, klaim yang disampaikan mengenai kelangkaan beras medium di Cipinang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Saat melakukan pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC yakni Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya, Satgas Pangan menemukan pasokan beras pada dasarnya stabil dan kenaikan harga masih wajar. Hasilnya menunjukkan, Kios Beras Idolaku memiliki stok sekitar 500 ton, Sumber Raya menyimpan 300-400

ton, dan Sinar Jaya memiliki stok hingga 200 ton.

Ketiganya mengonfirmasi tidak terjadi lonjakan pengeluaran pada 28 Mei. Rata-rata distribusi harian mereka berjalan normal (30-400 ton tergantung skala toko), dan kenaikan harga beras medium berkisar hanya Rp100-400/kg. Artinya, masih dalam batas kewajaran.

"Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara," tegas Brigjen Pol. Djoko Prihadi. Selain manipulasi data, Satgas juga mengendus adanya praktik percaloan dan monopoli yang berpotensi menekan pasar dan memengaruhi psikologis masyarakat.

Investigasi terhadap struktur data dan alur distribusi di bawah pengelolaan PT. Food Station Tjipinang Jaya masih terus berlangsung. Satgas Pangan menegaskan akan terus mendalami dan mengawasi pergerakan harga dan pasokan beras, serta siap mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan bukti manipulasi yang merugikan negara dan rakyat.

Yul

Temuan Awal Satgas Pangan



1. Data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton tidak valid. Angka tersebut bukan hasil penghitungan riil, tetapi berasal dari selisih stok akhir tanggal 27 Mei (55.853 ton) ditambah pemasukan (2.108 ton), kemudian dikurangi hasil stock opname tanggal 28 Mei (46.551 ton).



2. Data pengeluaran beras yang riil dan terverifikasi hanya sebesar 2.368 ton, bukan 11.401 ton yang ditayangkan pada panel informasi stok beras PIBC.



3. Stok 46.551 ton yang dilaporkan tidak dihasilkan dari pengamatan aktual di lapangan, melainkan berdasarkan laporan pengelola toko atau data kiriman—bahkan dalam beberapa kasus, Satgas tidak bertemu langsung dengan pihak gudang.



4. Pengeluaran beras yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan bajaj tidak tercatat karena volumenya kecil (di bawah 500 kg).



5. Tidak ada SOP resmi stock opname di lingkungan PIBC.



6. Stock opname terakhir dilakukan pada Oktober/November 2023, dan baru dilakukan kembali pada Mei 2025 atas perintah pimpinan akibat dinamika harga di pasaran dan keluhan dari pedagang.



Dulu masyarakat Indonesia lebih akrab dengan pepaya Bangkok yang ukurannya cukup besar. Dengan berubah era, masyarakat kini cenderung memilih buah dengan ukuran relatif lebih kecil. Namanya, pepaya California atau Calina hasil penelitian Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS beserta tim dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB University.

Diperkenalkan sejak 28 Mei 2010, masyarakat Indonesia nama pepaya California lebih dikenal ketimbang pepaya Calina. Padahal kedua adalah buah yang sama, meski sebutan Pepaya California lebih populer dibanding Calina.

Menurut Sriani, penggunaan istilah California hanya untuk meningkatkan nama jual agar lebih terlihat mentereng. Pepaya berukuran kecil dengan bobot rata-rata 1,3 kg, pada awalnya buah ini banyak dijual hanya di berbagai supermarket besar dengan label "Pepaya California". Hingga kemudian sudah diekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan makin populernya pepaya Calina, kini makin banyak petani di berbagai daerah penjur Indonesia yang menanam, karena berbagai keunggulannya dan tingginya permintaan pasar. Pepaya asli Indonesia ini memiliki daging buah yang tebal dan rasa yang manis.

"Hal yang membuat pepaya Calina disukai sehingga merajai pasar buah adalah rasanya yang manis, dagingnya tebal dan lembut, tidak benyek, warnanya merah, dan tidak mengeluarkan aroma pepaya yang khas. Di pasaran, pepaya Calina memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat diminati oleh masyarakat," tutur Sriani.

Buah pepaya ini ditemukan Sriani beserta tim peneliti lainnya di rumah warga bernama Okrin. Sriani memerlukan waktu tujuh tahun dalam proses pemuliaan buah ini, guna mendapatkan bibit terbaik secara kualitas dan produktivitas, hingga menghasilkan varietas pepaya baru yang diberi nama

pepaya Calina. Namun demikian menarik pasar, pepaya varietas baru tersebut kemudian diberi nama California.

Wanita kelahiran Ponorogo pada 1959 silam ini mengawali karirnya dengan menjadi dosen di IPB University, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Putra Malaysia (UPM) yang fokus pada pemuliaan tanaman. Sriani mendapat penghargaan sebagai Dosen Berprestasi IPB University dan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional di tahun 2006.

Beberapa penghargaan lainnya yang berhasil didapat Sriani antara lain penghargaan dari rektor PIPB, penghargaan Riset Unggulan Strategi Nasional (Rusnas Award, 2004) dari Kementerian Riset dan Teknologi, Satyalencana Karyasatya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006, serta penghargaan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada tahun 2010.

Dalam rangka Gerakan Revolusi Oranye, PTPN III telah menanam pepaya Calina di lahannya seluas 2.500 ha. Gerakan ini bertujuan meningkatkan angka produksi dan konsumsi buah nusantara serta menargetkan Indonesia sebagai produsen buah tropika terkemuka di ASEAN pada 2025 dan berhasil memenuhi target ekspor sekitar 5,95 juta ton buah.

Keunggulan Calina

Sriani mengungkapkan, keunggulan lain dari pepaya Calina adalah awet dan tidak mudah busuk, sehingga aman disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain memiliki daging buah tebal, rasa yang manis dan tidak mudah busuk, karakteristik lain juga dimiliki tumbuhan pepaya ini.

Meski secara fisik, warna, ukuran dan bentuk buah tidak jauh berbeda dengan pepaya lainnya, Sriani mengatakan, pohon pepaya Calina batangnya lebih pendek dan mempunyai masa panen lebih cepat dibanding varietas pepaya lain, hanya antara 1-1,5 meter.

Kemudian, setiap pohon berbuah lebat, delapan bulan tanam sudah bisa dipanen, rasa manis segar, ukuran buah tidak terlalu besar, warna merah jingga menyala, daging tebal dan lembut, daging buah tidak benyek dan tidak mengeluarkan aroma pepaya yang khas. Tanaman pepaya Calina juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik, sehingga mudah dibudidayakan, bisa ditanam di mana saja dan cepat panen.

Buah pepaya California memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Setiap 76 gram buah pepaya mengandung 22 IU vitamin

A, 47 mg vitamin C, 2 g serat, 18 mg kalsium, 8 mg magnesium, dan 1 mg kalium (Dalimartha, 2011). Vitamin A berperan untuk membantu penglihatan mata dan membantu proses pertumbuhan.

Pepaya Calina berakar tunggang, tergolong tanaman dikotil dan memiliki tipe daun bintang. Menariknya, tanaman pepaya Calina memiliki dua jenis bunga yakni bunga yang tidak dapat berbuah (kembang paes) dan bunga yang bisa berbuah.

Keunggulan yang dimiliki pepaya Calina diharapkan dapat membantu mewujudkan mimpi besar bangsa ini menjadi eksportir buah tropika terbesar di dunia pada tahun 2045. Pepaya Calina merupakan salah satu bentuk sumbangsih IPB University dalam mendukung terwujudnya Gerakan Revolusi Oranye yang diluncurkan pada 2013. **Sumber: alumniiipedia/Yul**

Keunggulan Konsumsi Pepaya



Pepaya menjadi buah yang sangat populer di masyarakat. Ternyata buah ini mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Kaya akan vitamin A, vitamin C dan Vitamin E menjadikan pepaya sebagai salah satu buah yang ampuh meningkatkan sistem imun tubuh.

Kandungan vitamin C dan likopen di dalam pepaya, menjadikan buah ini sebagai salah satu makanan yang baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Vitamin C juga dapat melawan bakteri dan virus yang berbahaya.

Vitamin A dan senyawa beta karoten pada pepaya mampu melawan penyakit seperti infeksi, pilek, flu, dan demam. Vitamin-vitamin pada pepaya juga berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan menjaga sistem imun bagi tubuh kita.

Antioksidan yang tinggi pada pepaya dapat mencegah oksidasi kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Kandungan likopen pada pepaya dapat menangkal kerusakan sel kulit dan kulit kemerahan akibat paparan sinar matahari.

Pepaya juga diketahui mengandung dua enzim yaitu enzim papain dan enzim chymopapain yang dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah peradangan. Selain itu, enzim pada pepaya juga secara alami dapat mengurangi protein, karbohidrat, dan lemak pada tubuh. Yuk konsumsi pepaya. **Yul**

Tanpa Penyuluh Subsidi Pupuk Bisa Salah Arah

Oleh :

Warsana, SP.M.Si., MP

Penyuluh Pertanian Ahli Utama di BRMP Jawa Tengah

Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan pemerintah dalam bentuk diskon harga. Ia adalah napas tambahan bagi petani kecil yang setiap musim tanam berjibaku dengan cuaca, modal terbatas, dan harapan besar untuk panen yang layak. Subsidi pupuk, jika dikelola dengan benar, adalah salah satu kunci penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sayangnya, persoalan di lapangan tidak selalu semulus niat baik di atas kertas.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, telah menyediakan berbagai jenis pupuk bersubsidi seperti Urea, SP-36, ZA, NPK Phonska, hingga pupuk organik. Tapi pupuk ini tak bisa dibeli begitu saja di warung sebelah. Petani harus memenuhi sejumlah syarat: terdaftar dalam kelompok tani, masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memiliki lahan maksimal dua hektare, dan tercatat di sistem e-RDKK. Sistem digital ini diharapkan dapat memastikan subsidi tepat sasaran dan meminimalisir kebocoran.

Ada setidaknya enam alasan mengapa subsidi pupuk adalah kebijakan yang layak dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Pertama, subsidi ini menjaga ketahanan pangan. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, petani bisa meningkatkan produktivitas tanpa terbebani biaya tinggi. Kedua,



ia menysar langsung petani kecil, yang menjadi tulang punggung pertanian Indonesia. Ketiga, subsidi membantu menstabilkan harga pangan.

Jika biaya produksi tinggi, maka harga beras, jagung, hingga sayuran di pasar bisa melambung. Keempat, subsidi pupuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kelima, subsidi melindungi petani dari fluktuasi liar harga pupuk global yang sangat dipengaruhi gejolak energi dan geopolitik. Dan keenam, tentu saja, subsidi berkontribusi pada kesejahteraan petani.

Namun, semua tujuan mulia itu hanya bisa tercapai jika tata kelola pupuk bersubsidi benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Tata kelola pupuk bersubsidi

mencakup perencanaan, pengadaan, penyaluran, pengawasan, hingga evaluasi. Di atas kertas, sistemnya terlihat rapi dan sistematis. Kelompok tani menyusun RDKK dibantu penyuluh pertanian, lalu data itu masuk ke e-RDKK. Pupuk kemudian disalurkan dari produsen ke distributor, ke kios resmi, dan akhirnya ke tangan petani. Petani menebus pupuk dengan KTP atau Kartu Tani sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Namun di lapangan, realitas tak selalu indah narasi kebijakan. Kelangkaan pupuk masih sering terjadi, distribusi kadang tak tepat waktu, dan pemahaman petani soal sistem digital masih rendah, terutama di pelosok desa. Belum lagi potensi penyelewengan, seperti penimbunan, pemalsuan data, atau pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar gelap.

Di tengah kompleksitas sistem dan keterbatasan sumber daya petani, penyuluh pertanian memainkan peran krusial. Mereka bukan hanya penghubung antara petani dan pemerintah, tapi juga menjadi guru, pendamping, sekaligus pengawas di lapangan. Mereka membantu penyusunan RDKK, mengedukasi pemupukan berimbang, mendampingi proses penebusan, hingga melaporkan temuan dan kendala ke pihak terkait.

Sayangnya, jumlah penyuluh aktif tak sebanding dengan luasnya

wilayah kerja. Di beberapa daerah, satu penyuluh bisa membina belasan bahkan puluhan kelompok tani. Ini jelas beban berat, apalagi jika dukungan fasilitas dan pelatihan juga terbatas.

Sikap petani terhadap pupuk bersubsidi sangat beragam. Ada yang bersyukur dan patuh pada aturan, aktif dalam kelompok, serta mengikuti arahan penyuluh. Tapi tak sedikit yang bingung menghadapi sistem digital, apatis karena pernah merasa dikecewakan, atau bahkan menyimpang dengan menjual kembali pupuk subsidi secara ilegal.

Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan program subsidi bukan hanya soal pupuk yang tersedia, tapi juga soal komunikasi, kepercayaan, dan literasi digital.

Tata kelola pupuk bersubsidi harus terus disempurnakan. Bukan hanya lewat penguatan sistem digital, tapi juga dengan pendekatan manusiawi. Pemerintah perlu lebih aktif mendengar suara petani, memperkuat peran penyuluh, dan menindak tegas penyimpangan di lapangan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pupuk bersubsidi bukan diukur dari banyaknya ton pupuk yang disalurkan, tapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan stabilitas pangan bangsa. Ini bukan sekadar program bantuan—ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara di ladang-ladang rakyatnya.

Distribusi Pupuk Subsidi



Oleh: **Memed Gunawan**



Siapa yang tidak tertarik dengan barang murah seperti Pupuk Subsidi. Bukan petani saja yang suka, orang tidak bertani juga mau. Untuk dijual lagi, di pasar harganya berlipat-lipat. Alokasinya yang dibatasi hanya untuk beberapa komoditas saja tentu membuat iri petani tanaman lain. Selama ini riuh distribusi pupuk bersubsidi tak pernah berhenti. Lalu keluarlah aturan baru.

Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan No. 15 Tahun 2025 adalah gebrakan baru. Aturan terkait peredaran pupuk bersubsidi yang jumlahnya ratusan dipangkas, distribusi dilakukan PT. Pupuk Indonesia (PI) langsung ke titik bagi (Gapoktan dan Koperasi

atau Pengecer), pengambilan pupuk dipermudah hanya menggunakan KTP, petani penerima dan komoditas yang mendapat pupuk subsidi bertambah.

Komoditas yang bisa menerima pupuk bersubsidi kini bertambah. Jika sebelumnya hanya untuk tanaman pangan, kini menjadi 10 komoditas. Ada padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Komoditas hortikultura yakni, cabai, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan perkebunan untuk petani tebu rakyat, kakao dan kopi. Satu lagi adalah pembudidayaan ikan. Pokoknya sangat menggembirakan petani. Ini angin segar.

Aturan yang lebih baik sudah diluncurkan. Penyalurannya pun menurut PI sudah lebih baik dari tahun lalu, produksi cukup 9,5 juta ton, walaupun yang diminta petani lebih dari itu. Pemerintah juga membuka lampu hijau untuk Poktan dan Gapoktan menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

Sayangnya memang Gapoktan yang telah bersedia menerima pupuk subsidi untuk disalurkan baru

tercatat kurang dari 300 Gapoktan dari total 80 ribuan lebih Gapoktan. Diharapkan dengan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih di tiap desa akan mempermudah petani menebus pupuk di titik bagi.

Di lapangan tidak mudah, rintangan selalu ada tapi ini adalah proses. Petani memang belum sepenuhnya menerima pupuk sesuai yang dibutuhkan. Di Jawa Timur, yang diterima hanya sekitar 30-60 persen dari yang diusulkan dalam RDKK. Terpaksa Dinas Pertanian setempat membagikan ke petani dalam porsi yang sama, yang dampaknya produktivitas yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.

Gapoktan tidak bisa menjadi penerima dan titik bagi karena dua alasan, Pertama, mereka tidak memenuhi persyaratan legalitas izin usaha. Kedua, insentif bagi Gapoktan sangat rendah, hanya Rp 75 per kilogram. Dengan perkiraan biaya yang harus ditanggung seperti naik-turun barang, resiko rusak dan biaya gudang, boleh jadi Gapoktan tidak memperoleh margin yang memadai.

Tantangannya memang banyak. Di daerah yang prasarana jalan atau lokasinya terpencil keberadaan pengecer atau koperasi yang per unitnya mencakup banyak desa, akan menyulitkan petani untuk menebus pupuk. Sementara kalau koperasi dibangun di setiap desa mungkin tidak memenuhi skala usaha. Ini dilema. Karena itu kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus dibangun dengan baik agar peran Pemda bisa membantu petani memperoleh pupuk.

Pupuk bersubsidi kini menjadi barang yang cukup seksi. Dengan harga di pasar bisa mencapai 3 atau 4 kali lipat dari harga subsidi yang hanya Rp 2.500 per kilogram, pengawasan memang harus ekstra keras. Demi petani, pemerintah pun harus habis-habisan membantu.

Perpres Terbit, Sertifikasi ISPO Wajib dari Hulu ke Hilir

Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

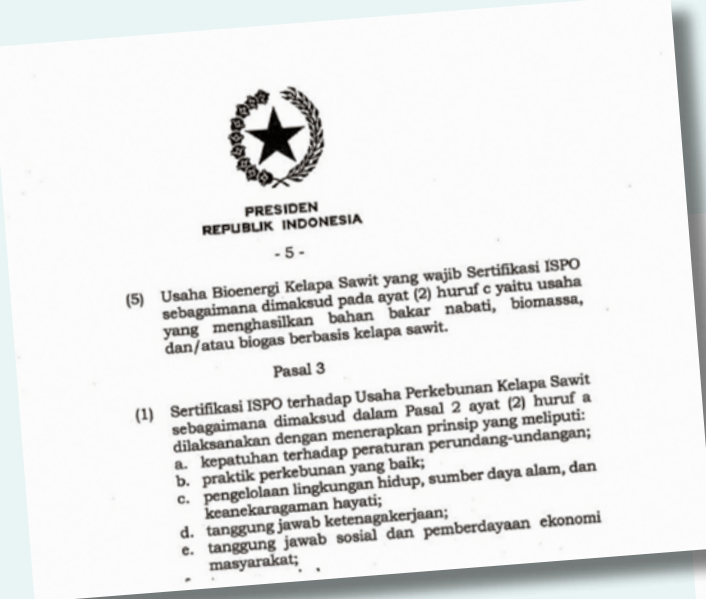
Regulasi ini sebagai langkah penting dalam memperluas cakupan dan memperkuat sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati menjelaskan, ISPO bukan sekadar label, melainkan sistem menyeluruh yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut. Dasar hukum ISPO mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 2, 3, dan 62. Implementasinya dituangkan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020, yang kini diperbarui menjadi Perpres No. 16 Tahun 2025.

Perubahan ini mencakup perluasan ruang lingkup dari hulu ke hilir, termasuk sektor industri olahan dan bioenergi. Dengan demikian, ISPO tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk sektor hilir dan Kementerian ESDM untuk bioenergi.

"Penambahan ruang lingkup ini dibarengi dengan restrukturisasi kelembagaan dan skema pembiayaan baru. Kini, pembiayaan ISPO untuk pekebun bisa difasilitasi oleh APBN, APBD, maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan," ujar Ratna.

Saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema "Perpres No. 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan" yang juga Musyawarah Besar Forwatan di Jakarta, Rabu (4/6), Ratna menambahkan, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pemberhentian sementara usaha dapat



dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ISPO.

Catatan Ditjen Perkebunan hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9 persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat. Dari sisi luasan, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam hal areal perkebunan sawit yang telah tersertifikasi berkelanjutan.

"Saat ini, kami sedang menyusun pembaruan dari Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia," kata Ratna.

Permentan ini dibutuhkan sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang rilis baru-baru ini. Sebelumnya sudah ada Permentan 38/2020 menjadi turunan dari Perpres lama yakni Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Skema ISPO Hilir

Sementara itu, dari sisi hilirisasi, Kementerian Perindustrian juga tengah menyiapkan skema sertifikasi ISPO untuk sektor hilir. Lila Harsyah Bakhtiar, Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kemenperin,

menyatakan bahwa terminologi ISPO hilir masih fleksibel, namun prinsip dasarnya tetap sama: memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan.

Menurut Lila, saat ini Indonesia hanya mengeksport sekitar 10 persen dari CPO mentahnya, sementara sisanya dalam bentuk olahan. Karena itu, menjaga ketelusuran (*traceability*) produk hilir menjadi sangat penting, mengingat pasar global kini semakin menuntut produk yang berkelanjutan. "Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan," jelasnya.

Saat ini terdapat 190 jenis produk hilir sawit, namun tidak semuanya akan disertifikasi. Fokus akan diberikan pada produk yang memiliki volume besar dan potensi pasar tinggi. Sertifikasi hilir akan memungkinkan pencantuman logo ISPO pada kemasan produk, sebagai penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip keberlanjutan.

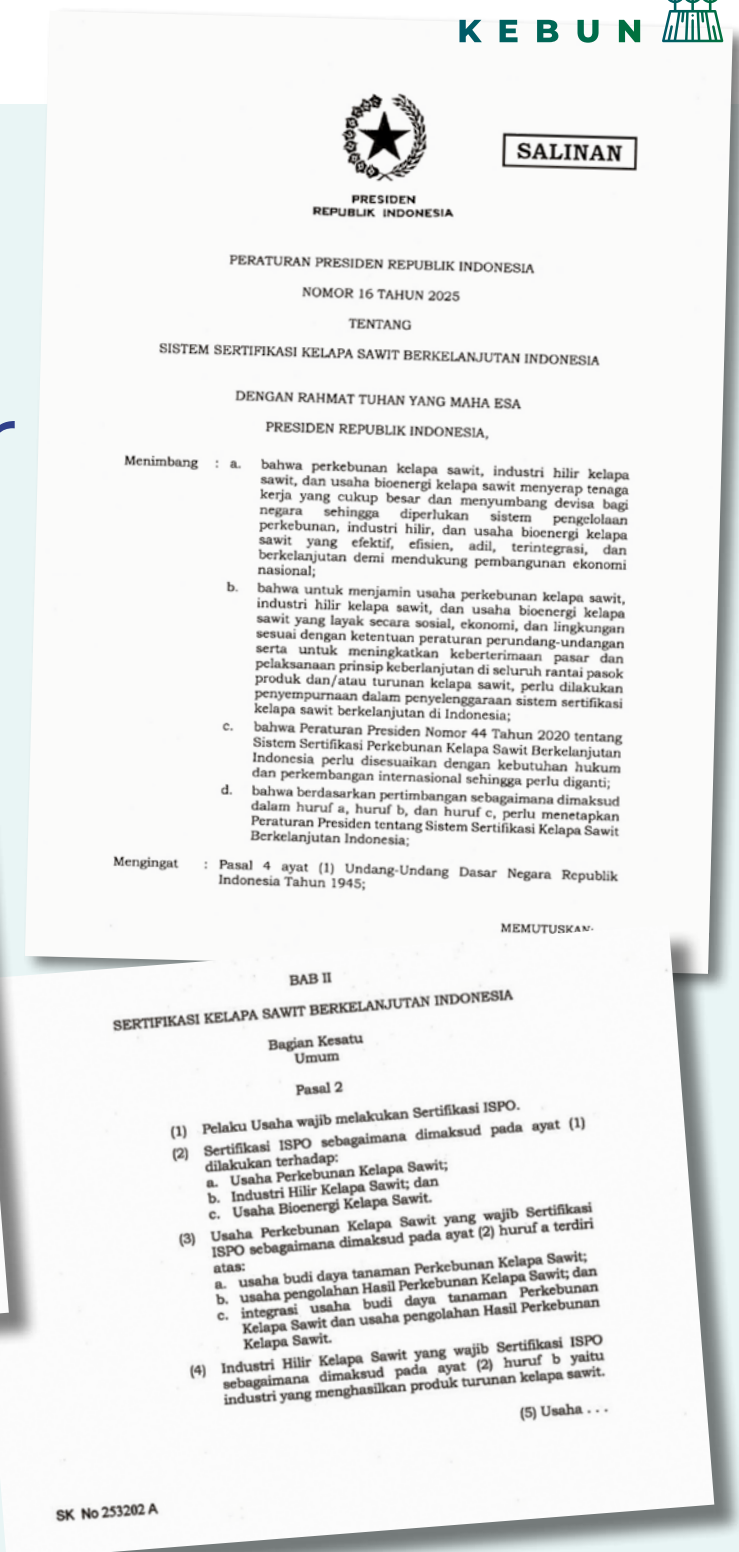
Lila juga menjelaskan bahwa model sertifikasi ISPO hilir akan mengacu pada sistem mass balance atau keseimbangan massa, yaitu men-

campur bahan baku bersertifikasi dengan yang belum, namun tetap dalam batas pengawasan yang ketat. "Keseimbangan massa membutuhkan sistem pencatatan yang ketat, dan kami akan mengadopsi beberapa norma dari standar internasional seperti RSPO, ISCC, dan MSPO," ujarnya.

Berbeda dengan sertifikasi lain seperti SNI, ISPO hilir akan mensertifikasi proses produksinya, namun label atau logo akan ditempatkan pada produk akhir. Sertifikasi ini akan berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem dokumentasi yang baik, dan praktik usaha yang berkelanjutan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN SDGs).

Per Juni 2025, draf peraturan ISPO hilir akan dipublikasikan untuk konsultasi publik. Proses sertifikasinya akan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020. Dengan skema yang disiapkan secara inklusif dan kolaboratif, pemerintah berharap sertifikasi ISPO hilir dapat diterapkan dengan efektif tanpa menjadi beban bagi pelaku usaha.

Yul



Gencarkan Program MBG, Kalbar Siap Bangun 586 Titik Dapur Gizi

Percepat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional menggandeng seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu.



Kerja sama ini menjadi tonggak awal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan dapur-dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik melalui penyediaan lahan pinjam pakai maupun pemanfaatan bangunan yang sudah ada.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan

anak sekolah. Di Kalimantan Barat sendiri, ditargetkan akan dibangun 586 titik dapur gizi.

"Angka ini masih jauh dari kebutuhan ideal. Karena itu, kami mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif mempercepat pembangunan SPPG ini," ujar Dadan dalam sambutannya.

Menurut data, sekitar 1,5 juta siswa di Kalbar menjadi sasaran utama program MBG, belum termasuk ibu hamil dan balita. Dadan juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak — dari pemerintah daerah, lembaga pen-

didikan, tenaga kesehatan hingga masyarakat — dalam mendukung pelaksanaan program ini.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebut MBG sebagai bagian dari misi besar Presiden RI dalam Asta Cita, sekaligus sejalan dengan visi Kalbar 2025–2030: membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

"Ini bukan hanya tentang

mengatasi stunting dan gizi buruk, tapi juga kesempatan untuk menggerakkan ekonomi daerah lewat pemanfaatan bahan pangan lokal," kata Norsan.

Lewat penandatanganan MoU ini, pemerintah berharap setiap daerah di Kalbar dapat melaksanakan program secara tepat sasaran, mengedepankan kearifan lokal, dan melibatkan komunitas setempat.

Humas BGN

Menuju Pengadaan yang Transparan, BGN Gelar Sosialisasi Dua Regulasi Kunci



Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang/Jasa menggelar kegiatan sosialisasi dua regulasi penting terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan yang menyoroti dua aturan utama, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 2 Tahun 2025, menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman internal terhadap kebijakan pengadaan terbaru.

Sosialisasi ini dihadiri oleh para

pejabat pimpinan tinggi pratama serta pegawai di lingkungan BGN, dengan narasumber langsung dari LKPP.

"Kita perlu memahami sejak dini bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa serta pencatatan BMN dilakukan dari awal. Keseragaman pemahaman sangat penting agar tidak ada perbedaan tafsir dalam pelaksanaannya," tegas Ranto, Kepala Biro Pengelolaan BMN dan

Pengadaan Barang/Jasa BGN.

Salah satu narasumber, Deasy Rachmawati, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, menjelaskan bahwa Perpres 46/2025 menggantikan Perpres 12/2021.

Regulasi baru ini tidak hanya menysar instansi pemerintah pusat dan daerah, tapi juga menjangkau institusi lainnya, termasuk peme-

rintah desa. "BGN sedang bertransformasi menjadi institusi yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengadaan. Ini bagian dari proses menuju tata kelola yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Perlem LKPP 2/2025 menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan dengan mekanisme penunjukan langsung dalam konteks program prioritas nasional, bantuan pemerintah, serta bantuan presiden berdasarkan arahan langsung dari Presiden.

"Penunjukan langsung ini ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program strategis yang bersifat mendesak dan tak bisa ditunda," jelas Sugiarso, Analis Kebijakan Ahli Pertama LKPP. Ia juga menambahkan bahwa regulasi ini mengatur alur konfirmasi arahan Presiden, tahapan pelaksanaan, ruang diskresi pengguna anggaran, serta peran penting APIP dalam memastikan akuntabilitas.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan informasi, sosialisasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi BGN dalam menjalankan tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **Humas BGN**

Jangan Salah Mengolah dan Menyimpan Daging Kurban

Perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban. Namun, melimpahnya daging kurban sering kali membuat kita tidak bisa mengolah semuanya dalam satu waktu. Untuk menjaga kualitas daging, penanganan dan penyimpanan daging kurban dengan benar menjadi sangat krusial.

Dosen IPB University dari Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Dr Tuti Suryati, membagikan panduan menyimpan dan mengolah daging kurban dengan benar. Ada beberapa langkah penanganan pertama pada daging kurban yang baru diterima sebelum diolah atau disimpan.

Mengingat proses penyembelihan kurban banyak dilakukan di luar rumah potong hewan (RPH) yang terstandar, Tuti mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menangani daging. Ia menyarankan untuk memastikan seluruh darah keluar sempurna saat penyembelihan. Kemudian, minimalkan kontaminasi dengan menjaga kebersihan peralatan dan tangan saat menangani daging.

"Distribusikan daging secepat mungkin agar tidak memberi waktu bagi bakteri untuk berkembang," ujarnya. Setelah mendapatkan daging kurban, Tuti mengatakan, agar memisahkan bagian daging dan jeroan. Kemudian, cuci daging dan jeroan menggunakan air bersih, terutama jika ada kotoran seperti tanah, pasir, kerikil, atau rumput. Lalu, tiriskan daging hingga tidak ada air yang menetes di permukaan.

Ia juga menyarankan, sebaiknya kemas daging per 250 gram atau 500 gram menggunakan plastik transparan yang tidak berbau. Lalu pastikan jeroan sudah dimasak jika akan disimpan beku. "Jika daging akan segera dimasak, cuci dengan air mengalir," katanya seperti dikutip dari laman IPB.ac.id.

Saat memasak, usahakan hingga suhu internal daging mencapai 70–80°C atau sekitar 30-60 menit, tapi tergantung ukuran potongan dagingnya. Memasak untuk membunuh bakteri yang ada di dalam daging.

"Sebaiknya gunakan bumbu rempah kaya antioksidan sesuai

kebutuhan masakannya, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, merica, ketumbar, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, pala, asam jawa, cabe merah, dan sebagainya," tuturnya.

Sedangkan daging yang belum akan diolah, Tuti mengatakan, sebaiknya disimpan dingin di kulkas (*refrigerator*). Jika daging akan disimpan, maka cuci dengan air mengalir dan bilas akhir dengan air matang. Kemudian, keringkan permukaan daging menggunakan tisu bersih. Simpan dalam kulkas (*refrigerator*) hingga dingin, lalu bekukan di freezer.

Namun untuk menyimpan daging di kulkas, Tuti menyarankan agar daging disimpan beku di freezer dan dikemas sesuai dengan porsi kebutuhan sajian. "Olahan daging dapat disimpan beku dalam kemasan sesuai porsi per sajian keluarga," katanya.

Dosen Fakultas Peternakan IPB tersebut juga mengingatkan, sebelum dimasak, daging beku harus di-*thawing* dengan cara yang benar dan dipanaskan. Proses *thawing* atau penyebaran kembali bisa dilakukan di kulkas (*refrigerator*).

Alternatif lain adalah merendam daging dalam air dingin tanpa membuka kemasannya, atau meletakkannya pada papan besi khusus yang higienis, bisa juga menggunakan *microwave*. "Hindari melakukan *thawing* daging beku pada suhu ruang tanpa kemasan. Selain itu, hindari membekukan kembali daging yang sudah di-*thawing*," ujarnya.

Hilangkan Amis

Untuk menghilangkan bau amis pada daging kurban, Tuti mengakui, sering kali menjadi keluhan masyarakat saat Idul Adha. Salah satu bahan alami yang kerap digunakan mengatasi masalah ini adalah jeruk nipis. Pertanyaannya, apakah jeruk nipis benar-benar efektif untuk menghilangkan bau tersebut?

Tuti Suryati menjelaskan, bau amis



pada daging umumnya terbentuk akibat reaksi pembusukan protein dan lemak yang dipicu kontaminasi bakteri, seperti *Aeromonas*, *Enterococcus*, *Acinetobacter*, *Moraxella*, *Chromobacterium*, dan *Pseudomonas*. Kontaminasi ini, dapat terjadi dari sisa darah pada jaringan daging, peralatan pemotongan yang tidak steril, ataupun tangan manusia yang menyentuh daging.

Bau tak sedap menurut Tuti, bukan hanya disebabkan bakteri, melainkan juga karena proses oksidasi lemak yang diawali dengan hidrolisis lemak dan dikatalisis enzim lipase. Lipase pada daging dapat berasal dari dagingnya sendiri, juga dapat dihasilkan bakteri yang mengontaminasi dagingnya.

"Kehadiran air bebas pada daging dapat mempercepat proses hidrolisis lemak, yang selanjutnya memicu oksidasi dan menghasilkan *off-flavor* atau bau tak sedap," katanya. Karena itu, Tuti kembali mengingatkan, mencuci daging secara sembarangan justru tidak disarankan karena dapat meningkatkan kandungan air bebas yang memicu kerusakan.

Sebagai gantinya, penggunaan bumbu dapur kaya antioksidan sangat dianjurkan untuk menutupi aroma tak sedap sekaligus menghambat reaksi oksidasi. "Bau amis bisa dicegah dengan menurunkan pH daging menggunakan bahan-bahan asam seperti jeruk nipis, lemon, atau cuka. Kandungan asam sitrat dan askorbat dalam jeruk nipis efektif menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk," ujar Tuti.

Namun, ia mengingatkan, jika daging sudah mengalami pembusukan, maka efektivitas jeruk nipis dan bahan sejenis dalam menghilangkan bau tidak terlalu tinggi. Selain itu, penggunaan bahan asam juga dapat memengaruhi rasa alami daging.

Tuti kembali menegaskan, jeruk nipis memang bisa membantu mengurangi bau amis pada daging kurban. Namun, penggunaannya jangan sampai mengubah cita rasa dagingnya dan tidak bisa diandalkan sebagai solusi utama. "Pencegahan sejak awal melalui penanganan higienis dan pengolahan yang tepat tetap menjadi kunci menjaga kualitas daging kurban," katanya. **Yul**

Trik Mengolah Daging Kurban

Hindari memasak daging yang masih beku, karena bisa membuat teksturnya alot. Pernyataan tersebut disampaikan Dosen IPB University dari Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Dr. Tuti Suryati.



Ia menganjurkan untuk mengolah daging dengan bumbu-bumbu kaya antioksidan dan memasak dengan suhu serta waktu yang cukup. Bagaimana pengolahan daging kurban yang benar dan efektif? Ini saran dari Tuti.

Pertama, pastikan menggunakan panas yang cukup, baik direbus, dipanggang, dibakar, atau digoreng

hingga matang sempurna. Kemudian, hindari memasak daging hingga gosong saat membuat sate, daging panggang, atau daging bakar.

Sebaiknya gunakan bumbu rempah untuk menghasilkan olahan daging yang lebih sehat. Jika ingin membuat sate yang empuk, tambahkan parutan nanas atau bungkus dengan daun pepaya sebelum dimasak.

"Jika mengolah daging kurban yang sudah disimpan beku, rendam daging yang masih dalam kemasan di air dingin hingga kembali berbentuk segar, barulah kemudian dimasak sesuai keinginan," tuturnya. **Yul**

Dari Rawa Lebak, Brigade Pangan Angkat Derajat Petani

Dari lahan rawa lebak yang kerap tergenang banjir, Brigade Pangan muncul sebagai harapan baru, mengangkat derajat petani lewat alsintan modern, efisiensi kerja, dan peningkatan pendapatan.

Dibentuk sebagai penyedia jasa sewa alat mesin pertanian atau alsintan, Brigade Pangan Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan kini menjadi tumpuan harapan bagi para petani di desa yang lama bergantung pada cara-cara tradisional. Di bawah kepemimpinan Raden Holi Patkam, brigade ini menjelma menjadi

penggerak roda pertanian berbasis efisiensi dan kemandirian.

Brigade Pangan mendapat dua unit alsintan dari pemerintah: satu unit Combine Harvester dan satu unit Traktor Roda 4. Sejak kehadiran dua alat ini, pekerjaan di sawah berubah drastis. Jika sebelumnya panen membutuhkan waktu sehari-hari dengan tenaga banyak, kini cukup satu hari dengan tenaga minimal.

"Dulu ngandelin buruh harian,



belum lagi kalau hujan datang panen bisa molor. Sekarang jauh lebih cepat dan hemat," ujar Raden Holi, sambil tersenyum puas melihat hasil panen yang sudah tersusun rapi.

Tak hanya cepat, biaya operasional juga jauh lebih rendah. Menyewa alat dari Brigade Pangan terbukti lebih hemat dibanding dari luar desa yang biasanya mengenakan tarif lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, kehadiran brigade ini juga membuka lapangan kerja baru bagi para pemuda setempat.

Dalam waktu singkat, Brigade Pangan berhasil mencatat omset sebesar Rp85 juta dengan pendapatan bersih mencapai Rp13 juta. Jumlah yang cukup signifikan untuk usaha sekelas desa, dan menjadi bukti bahwa teknologi tak hanya mempercepat kerja, tapi juga mendatangkan untung.

Andi, salah satu operator traktor, bercerita bagaimana hidupnya berubah. "Saya dulu kerja serabutan. Sekarang jadi operator tetap. Dapat pelatihan, dapat penghasilan rutin. Rasanya bangga bisa kerja di tanah sendiri," ujarnya penuh semangat.

Hadirnya Brigade Pangan

memberikan angin segar bagi para petani. Mereka tak lagi dipusingkan biaya besar untuk mengolah lahan dan memanen hasil. Efisiensi kerja meningkat, hasil panen terjaga, dan para anggota brigade pun mendapatkan pendapatan tambahan.

"Sekarang petani lebih tenang. Biaya turun, hasil tetap bagus. Kami juga bisa bantu tetangga dengan harga sewa alat yang terjangkau," lanjut Holi.

"Sekarang petani lebih tenang. Biaya turun, hasil tetap bagus. Kami juga bisa bantu tetangga dengan harga sewa alat yang terjangkau," lanjut Holi.

Lebih dari sekadar mesin, Brigade Pangan adalah simbol kemandirian petani lokal. Ia menjadi contoh bahwa desa bisa maju dengan manajemen yang tepat dan semangat gotong royong yang terus dijaga.

Namun, jalan sukses tentu tak mulus sepenuhnya. Lokasi Desa Muara Baru yang berada di kawasan rawa lebak menyisakan tantangan besar. Saat musim hujan, banjir menjadi ancaman. Sebaliknya, musim kemarau membawa kekeringan yang menyulitkan olah lahan.

"Kami harus pintar atur waktu. Kadang alat sudah siap, tapi lahannya belum bisa diolah karena tergenang. Atau malah terlalu kering, traktor susah masuk," kata Holi.

Meski demikian, semangat tak pernah surut. Brigade Pangan terus mencari solusi, mulai dari pelatihan perawatan alat, manajemen sewa yang fleksibel, hingga kolaborasi antarwilayah.

"Brigade ini milik semua. Kita bangun sama-sama, kita jaga sama-sama. Supaya petani bisa terus hidup layak dari sawahnya sendiri," tutup Holi, memandang jauh ke hamparan padi yang siap panen. **Nattasya**



AGRITIPS

Servis Rutin, Mesin Tangguh Panen Lancar

Mesin pertanian adalah mitra setia para petani di lapangan. Tanpa mereka, pekerjaan seperti membajak, menanam, hingga memanen akan terasa jauh lebih berat dan memakan waktu. Tapi sebagaimana mitra kerja lainnya, mesin pun butuh perhatian dan perawatan yang konsisten.

Salah satu langkah paling penting yang sering diabaikan adalah menjadwalkan servis rutin dan kalibrasi secara berkala idealnya setiap tiga hingga enam bulan sekali.

Di banyak desa, traktor dan combine harvester jadi tulang punggung aktivitas pertanian. Namun, seiring waktu dan beban kerja yang berat, performa mesin bisa menurun.

Jika tidak segera diservis, berbagai komponen di dalamnya bisa mengalami keausan, kotoran

menumpuk, hingga terjadi ketidakseimbangan sistem.

Mesin yang dibiarkan terlalu lama tanpa dirawat tak hanya membuat pekerjaan jadi lambat, tapi juga bisa jadi jauh lebih boros bahan bakar. Bandingkan dengan mesin yang rutin diservis, tarikan lebih ringan, pembakaran lebih efisien, dan tentu saja pengeluaran untuk BBM pun jauh lebih irit.

Selain servis, kalibrasi juga tak kalah penting. Kalibrasi bertujuan untuk memastikan setiap fungsi dan gerakan mesin bekerja sesuai standar. *Combine harvester*, misalnya, jika tidak dikalibrasi dengan baik, bisa menghasilkan panen yang tidak maksimal, gabah terbuang, pemotongan tidak rata, hingga kerusakan pada bulir padi.

Padahal, dengan sedikit penyediaan dari teknisi ahli, semua itu bisa dihindari. Hasil kerja menjadi lebih presisi, bersih, dan efisien.

Bawa mesin ke teknisi terpercaya adalah langkah bijak. Jangan hanya



tergiur ongkos murah atau janji cepat selesai, tapi pastikan teknisinya memang paham dengan karakter mesin pertanian.

Servis yang dilakukan dengan benar akan mendeteksi kerusakan sejak dini, sebelum masalah menjadi lebih besar dan mahal untuk diperbaiki.

Tak bisa dipungkiri, merawat mesin memang butuh waktu dan biaya. Tapi bila dibandingkan dengan

kerugian akibat kerusakan parah, servis dan kalibrasi rutin justru jauh lebih ekonomis.

Mesin yang sehat tak hanya mempercepat pekerjaan di lahan, tapi juga menjamin hasil yang optimal dan aman digunakan. Jadi, jangan tunggu rusak dulu, jadwalkan servis dan kalibrasi secara rutin, karena dari mesin yang terawat, produktivitas pertanian bisa tumbuh lebih kuat. **Nattasya**



HARI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2025
Hentikan Polusi Plastik

Plastik mengancam kehidupan kita dan planet ini. Saatnya kita bertindak untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.



Kita bisa memulai dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mendukung produk ramah lingkungan.















Komersialisasi E-PAPER SinarTani

SinarTani

Tabloid
sinartani.com

SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

Ada Kios Pupuk Nakal, Laporkan Segera

Pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Niatnya adalah membantu petani agar bisa menerima haknya. Karena itu, jika ada distributor atau kios pupuk yang nakal, segera laporkan.

Seperti terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Saat Menteri Pertanian Republik, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kebun tebu P240T di wilayah Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6). Mentan Amran langsung merespons laporan adanya pelanggaran harga pupuk di wilayah tersebut setelah mendengarkan aspirasi dari petani yang disampaikan langsung Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Salah satu permasalahan yang diangkat adalah masih adanya pupuk bersubsidi yang dijual di atas HET di wilayah Lumajang. "Ada yang jual pupuk di Lumajang di atas angka HET, Pak Menteri. Mohon arahnya," ujar Indah saat menyampaikan berbagai keluhan di hadapan Menteri Pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Amran menekankan bahwa praktik penjualan pupuk di atas HET tidak dapat ditoleransi. Ia memerintahkan agar izin distributor yang melakukan pelanggaran tersebut segera dicabut. "Penjual pupuk di atas HET, dicabut izinnya," tegas Amran.

Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang menjual pupuk melebihi harga ketentuan. "Saya minta Kapolres Lumajang untuk mendampingi dan agar distributor yang menjual pupuk di atas HET dicabut izinnya," kata Amran.

Respon Pupuk Indonesia

Respons cepat pun datang dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan langsung menghentikan kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi dengan kios Berkah Abadi yang berasal dari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan antara Pupuk Indonesia dan Polres Lumajang, pemilik kios mengakui telah menjual pupuk NPK subsidi sebesar Rp 150.000 per sak atau di atas HET.

Hal ini disampaikan Senior Manager (SM) Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo, menyusul arahan Menteri Pertanian saat menyapa petani di Lumajang, Selasa (10/6).



"Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di surat perjanjian jual-beli antara distributor dan kios, atas pelanggaran ketentuan menjual di atas HET, maka Kios Berkah Abadi secara resmi ditutup atau diputus kontraknya pada hari ini pada tanggal 10 Juni 2025," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Pupuk Indonesia memastikan bahwa mulai hari ini operasional Kios Berkah Abadi dihentikan. Secara sistem, aplikasi penebusan pupuk subsidi atau i-Pubers, yang biasanya digunakan oleh kios, telah dinonaktifkan agar tidak ada lagi transaksi.

Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani. Stok pupuk subsidi NPK sebanyak 8 ton yang ada di kios Berkah Abadi akan dialihkan secara fisik kepada kios UD Madani yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Pupuk Indonesia.

Sebagai informasi, HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur Kementerian Pertanian, yaitu untuk pupuk Urea sebesar Rp 2.250/kg, pupuk NPK Phonska Rp 2.300/kg, pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg, dan pupuk Organik Rp 800/kg.

Saroyo mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi memiliki sanksi tegas. Apabila terbukti maka kios akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.

Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia terus mengencakan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET. Seperti halnya, mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran

pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

Saat webinar Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (11/6). Ketua Tim Kerja untuk Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Muchamad Affandi menyoroti tingginya angka petani yang tidak menebus pupuk meski sudah terdaftar.

Pada tahun 2024, tercatat 33.276 NIK petani tidak melakukan penebusan. Kondisi ini ikut menurunkan serapan pupuk dibanding tahun sebelumnya. "Ini akan kami evaluasi. Petani yang tidak aktif menebus pupuk akan kami hapus dari sistem, supaya data lebih akurat dan pupuk tepat sasaran,"

katanya.

Persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah masih adanya pupuk subsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta distribusi yang tidak tepat sasaran. Ada kasus di mana petani yang tidak terdaftar di e-RDKK justru mendapat pupuk subsidi, sementara petani sah kesulitan menebus. "Ini soal pengawasan. Kami akan perketat, termasuk soal HET. Tidak boleh ada yang main-main dengan subsidi yang hakikatnya untuk membantu petani," ujarnya.

Saat ini, penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur baru mencapai sekitar 36,6 persen. Angka ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesiapan petani menghadapi musim tanam. Pemerintah daerah kini terus menggenjot realisasi sambil melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Kami terus bergerak. Mulai dari pendataan petani, verifikasi berjenjang, sampai kebijakan re-alokasi antar kabupaten. Semua ini demi memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan," kata Affandi.

Herman/Yul

Hotline Lapor Pupuk Bersubsidi

PT Pupuk Indonesia membuka hotline dan pusat layanan resmi untuk melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi. Layanan pelanggan yang bisa diakses seluruh petani dengan kontak bebas

pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918001. Masyarakat juga dapat berpartisipasi mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Jika terdapat hal mencurigakan, jangan segan untuk melapor kepada aparat penegak hukum.

Kaki Seribu Masuk Rumah, Jangan Usir dengan Insektisida

Kehadiran kaki seribu di rumah kerap membuat penghuni rumah resah. Namun, menurut peneliti muda IPB University dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Nadzirum Mubin, SP, MSi, penggunaan insektisida sintetis tidak diperlukan untuk mengatasi serangga tersebut.

“Tidak perlu menggunakan insektisida sintetis untuk membunuh kaki seribu, cukup melakukan sanitasi atau pembersihan, pengeringan, dan penutupan celah masuk,” ujar Nadzirum. Justru menurutnya, kaki seribu memiliki peran penting sebagai pengurai alami di ekosistem.

Serangga ini memakan sampah organik seperti daun, ranting, dan kayu yang membusuk sehingga membantu mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Namun, akibat alih fungsi lahan, habitat alami kaki seribu terganggu, yang menyebabkan hewan ini sering masuk ke area permukiman.

Jika dimusnahkan secara masif menggunakan bahan kimia sintetis,

maka bisa berdampak negatif pada keseimbangan mikroorganisme tanah dan mengganggu proses alami penguraian bahan organik. “Penggunaan insektisida secara tidak bijak dapat mengurangi keanekaragaman hayati tanah. Oleh karena itu, pengelolaan kehadiran kaki seribu sebaiknya dilakukan secara alami dan preventif,” kata Nadzirum seperti dikutip dari IPB.ac.id

Untuk mengusir kaki seribu, cukup dengan menyapu dan memindahkannya ke luar rumah. Jika jumlahnya banyak, Nadzirum menyarankan untuk mencari sumber kelembapan seperti retakan lantai, saluran air bocor, atau tumpukan sampah organik, lalu mengatasinya.

Penyebab Masuk Rumah

Melansir dari Forbes Home, ada



beberapa penyebab kaki seribu masuk rumah. Pertama, rumah lembap. Kaki seribu menyukai dan membutuhkan tempat yang lembap untuk hidup. Oleh karena itu, kamu bisa ‘mengeringkan’ atau menjaga kelembaban bagian-bagian rumah, termasuk kamar mandi untuk mencegah masuknya kaki seribu.

Kedua, ada tanaman membusuk. Selain itu, kaki seribu adalah hewan pemakan bahan organik yang sudah mati atau membusuk (saprofit). Jadi, kalian sebaiknya menghilangkan rerumputan yang sudah membusuk atau lapisan kompos.

Ketiga, ada celah di rumah. Di sisi lain, kalian juga harus mengecek retakan atau celah pada fondasi bangunan maupun jarak bawah pintu yang memungkinkan kaki seribu masuk ke dalam rumah. Perbaiki saluran air di rumah dan jangan terlalu banyak menyiram tanaman di taman.

Supaya kaki seribu tidak masuk rumah, pastikan untuk menutup segala celah. Perhatikan fondasi di sekitar rumah, termasuk engsel pintu dan jendela apakah ada celah atau tidak. Gunakan sealant untuk menyegelnya. **Yul**



PRICE LIST BERLANGGANAN

SINAR TANI CETAK

RP. 16.000

Per Edisi
Minimum Pembelian

RP 64.000/BLN
RP 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER

Rp. 72.000/ Thn

CONTACT

081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)

081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)

081216304232 - Wawan (Sinar Tani)

085921280998 - Asrori (Sinar Tani)








Nama :

Alamat :

Nomor Whatsapp :

Email :

Jabatan :

No rek : 127.0096.016.587

Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

 sinartani.co.id

 [tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)

 [@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST)

 [tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)

 [SINTA TV](#)

 [SINTA TV](#)

Panen di Lumajang, Pemerintah Siapkan Strategi Swasembada Gula

Kementerian Pertanian menyiapkan strategi untuk mencapai swasembada gula nasional. Strategi-strategi ini difokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, pemberdayaan petani secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan petani tebu.



Saat panen dan tanam tebu yang dilaksanakan di Kebun Lumajang 3 AFD, Desa Banter Barat, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa (10/6), Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaimen merinci enam strategi kunci yang akan dilakukan pemerintah secara komprehensif dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

Pertama, melakukan penguatan penyuluhan kepada petani. Kedua, memperbaiki sistem pengelolaan perkebunan tebu. Ketiga, menyediakan sarana produksi, termasuk memberikan kemudahan akses pupuk. Keempat, perbaikan irigasi. Kelima, pengelolaan tanah. Keenam adalah harga harus menguntungkan petani. "Kalau ini diberesin semua, swasembada jadi kenyataan," katanya.

Namun Amran mengakui, pelaksanaan keenam strategi tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun swasta. "Alhamdulillah, kita bekerja keras dan bergandengan tangan. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini adalah PR kita bersama. Kita kolaborasi, pasti bisa," ujarnya.

Dorong Pelaku Usaha

Amran juga mendorong seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional. "Kita harus bergerak eksponensial. Seperti

yang sudah terjadi pada sektor pangan, stok beras dan jagung kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan, sekarang giliran tebu yang kita benahi," ujar Amran pada rapat kerja pengembangan tebu di Kantor PT. SGN di Surabaya, Jawa Timur.

Amran menegaskan, pengembangan tebu nasional akan difokuskan pada dua strategi utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mencakup perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang efisien, dan penanganan serius terhadap kondisi ratoon.

"Bayangkan, 86 persen ratoon kita sudah 3 keatas, berarti sudah rusak kan. Nah, kita harus selesaikan ini dalam waktu singkat. Paling lambat 3 tahun kita harus bongkar ratoon, seluruhnya harus dibongkar, tidak ada pilihan," tegas Amran.

Untuk mendukung intensifikasi, pemerintah siap memberikan bantuan dalam bentuk pupuk bersubsidi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga dukungan benih yang berkualitas melalui sinergi dengan BUMN seperti PTPN. Sementara untuk ekstensifikasi, pemerintah telah menargetkan perluasan lahan tebu baru hingga 200.000 ha melalui kolaborasi dengan PTPN, sebagai bagian dari total 500.000 ha lahan tebu yang sedang diupayakan.

"Ini bukan target maksimal (lahan), ini target minimal. Bisa mulai disiapkan tahun ini dan diselesaikan paling lambat tiga tahun. Anggaran untuk gula kalau untuk PTPN

diperkirakan Rp10 hingga Rp40 triliun," ucap Amran.

Pada kesempatan itu, Amran juga mendorong petani untuk menyerap KUR untuk memperbaiki tanaman tebu. "Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat. Sekarang ini setelah Rp 500 juta, petani tidak bisa mengambil lagi. Nah ini kan menghambat," tambahnya.

Mentan juga bertekad untuk meningkatkan produktivitas gula nasional yang saat ini masih dikisaran 4 ton/ha. Seperti diketahui, data menunjukkan produksi gula per hektar sempat menembus angka 14 ton, yakni terjadi pada era 1930-an. "Ini berarti harus ada yang dibenahi. Doakan mudah-mudahan minimal produksi gula kita bisa seperti jaman dulu lagi, minimal 14 ton lah produksinya," ujar Amran dengan optimis.

Produksi Tebu Dalam Negeri

Namun melihat tren produksi saat ini, Amran juga optimis kebutuhan gula konsumsi dalam negeri mampu tercukupi sepenuhnya paling lambat di tahun 2026. Apalagi, produksi gula dalam negeri terus mengalami peningkatan. Tahun ini, produksi nasional diperkirakan mencapai 2,9 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terbilang positif mengingat ketidakpastian iklim global yang terjadi saat ini.

"Kita penuhi dulu gula konsumsi. Paling lambat tahun depan gula

konsumsi sudah beres. Tapi jangan hanya gula konsumsi. Kita kejar juga gula industri. Kalau ini berhasil, kita bisa menghemat devisa hingga Rp 40 triliun," tuturnya.

Sebagai informasi, produksi gula nasional Tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi Tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton. Berdasarkan perkiraan awal Tahun 2025, produksi gula tahun ini diperkirakan sebesar 2,901 juta ton.

Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada tahun 2028, sedangkan gula industri pada tahun 2030. Dengan melihat tren saat ini, Mentan Amran optimis swasembada gula dapat terwujud lebih cepat dari target yang ditetapkan.

"Kita optimis swasembada gula segera tercapai. White sugar kita sudah hampir mencukupi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kita sedang menuju swasembada, kita mau bukan hanya gula untuk konsumsi, tapi juga industri," kata Amran.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 menargetkan swasembada gula konsumsi tercapai pada 2028, dan swasembada gula industri serta bioetanol pada 2030. Saat ini, produksi gula nasional pada 2024 tercatat 2,46 juta ton, naik 8,57 persen dari 2023. Namun, kebutuhan nasional mencapai 8,1 juta ton, sehingga masih perlu tambahan 5,6 juta ton untuk mencapai swasembada. **Yul**

14 Komoditas Terbuka untuk Investasi Hilirisasi

Hilirisasi produk pertanian merupakan jalan cepat Indonesia untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh secara global, bahkan menjadi negara superpower. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat kuliah umum Perkembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di AAS Building, Makassar, dihadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Senin (9/6)



Kekuatan sektor pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi, tetapi juga pada menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir. “Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” tegasnya.

Ia mencontohkan, kelapa dalam yang semula hanya dijual Rp1.350 per kilogram bisa bernilai hingga Rp145 ribu per liter jika diolah menjadi *Virgin Coconut Oil* (VCO). Komoditas lain seperti kakao dan mete juga bisa mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat. Bahkan, kelapa sawit kini telah diolah menjadi biofuel (B50) yang berfungsi sebagai pengganti solar.

Lebih jauh, Mentan Amran menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa S2 dan S3, dalam mendukung agenda hilirisasi melalui riset dan inovasi. Menurutnya, pemerintah telah menyusun strategi investasi pertanian yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Dengan investasi sebesar Rp371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

14 Komoditas

Kementerian Pertanian membuka kesempatan hilirisasi 14 komoditas pertanian. Hilirisasi komoditas pertanian tersebut diyakini mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah fantastis yaitu lebih dari 8,6 juta tenaga kerja.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa hilirisasi ini akan fokus pada komoditas yang produksinya selama ini sudah masif di Indonesia.

“Menteri mendorong hilirisasi dari produksi pertanian yang sudah ada. Ini akan lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dibanding dengan menciptakan produk yang baru,” kata Idha dalam Diskusi Akademik Himpunan Alumni Fateta IPB, di IPB Convention Center, Bogor.

Strategi ini bukan hanya sebatas teori. Hitung-hitungan dari Kementan menunjukkan, jika program ini berjalan optimal, akan ada sekitar 5,5 juta hektar lahan yang bisa digarap. Dan dari situ, lebih dari 8 juta orang Indonesia bisa mendapat pekerjaan.

Langkah hilirisasi ini bukan sekadar transformasi ekonomi, tapi juga revitalisasi harapan bagi jutaan tangan yang siap bekerja. Bukan hanya peluang kerja yang terbuka lebar, tapi juga potensi ekspor yang makin kuat dan ketergantungan impor yang makin berkurang. Dengan strategi ini, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mandiri pangan, kuat industri, dan adil secara ekonomi. **Gsh**

Daftar Lengkap dengan Target Lahan dan Serapan Tenaga Kerja

No	Komoditas	Keterangan
1	Ayam	- Produk olahan: nugget, sosis, tepung telur, pakan - Lokasi: 5 cluster pengolahan - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 39.108 orang
2	Kelapa Dalam	- Produk olahan: santan dan produk samping - Lahan: 500 ribu hektare - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 1.156.246 orang
3	Kakao	- Produk olahan: bubuk cokelat dan butter - Lahan: 500 hektare - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 950.007 orang
4	Mete	- Produk olahan: kacang mete - Lahan: 100 ribu hektare - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 424.823 orang
5	Kopi	- Produk olahan: biji kopi arabika hijau - Lahan: 200 ribu hektare - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 553.346 orang
6	Tebu	- Produk olahan: gula - Lahan: 500 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 726.748 orang
7	Kelapa Sawit	- Produk olahan: biodiesel - Lahan: 2 juta hektare - Substitusi impor BBM - Serapan tenaga kerja: 1.947.339 orang
8	Lada	- Produk olahan: biji lada dan lada bubuk - Lahan: 100 ribu hektare - Orientasi: ekspor - Serapan tenaga kerja: 211.897 orang
9	Ubi Kayu	- Produk olahan: pati dan bioethanol - Lahan: 300 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 316.100 orang
10	Bawang Putih	- Produk olahan: bawang putih konsumsi - Lahan: 100 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 125.172 orang
11	Cold Chain (Rantai Dingin)	- Fungsi: penyimpanan dan transportasi pangan segar - Fokus: infrastruktur logistik pangan - Serapan tenaga kerja: 550 orang
12	Kapas	- Produk olahan: serat kapas dan minyak biji kapas - Lahan: 900 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 1.531.899 orang
13	Kacang tanah	- Produk olahan: kacang tanah curah - Lahan: 200 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 348.660 orang
14	Kacang hijau	- Produk olahan: kacang hijau curah - Lahan: 100 ribu hektare - Substitusi impor - Serapan tenaga kerja: 286.300 orang